

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Sistem dan prosedur kredit Bank telah dibakukan untuk menjamin diterapkannya kebijakan dan pelaksanaan pemberian pinjaman secara konsisten. Untuk kredit produktif, Bank menggunakan model *Internal Credit Risk Rating* untuk menganalisis risiko bisnis dan finansial dari debitur secara obyektif dan memberikan rating kepada nasabahnya. Selain itu, Bank juga menggunakan *Credit Risk Capital Allocation and Pricing* untuk mengkuantifikasi risiko kredit dan menentukan harga yang sesuai berdasarkan risiko kredit.

Untuk kredit konsumtif, Bank menggunakan model *Internal Credit Scoring* untuk menganalisis dan menghitung risiko dari pemberian kredit konsumtif.

Dalam rangka menerapkan prinsip pemberian kredit yang sehat, Bank menerapkan prinsip *Four Eyes* (pengambilan keputusan kredit yang dilakukan oleh dua orang atau lebih) pada setiap kantor cabang dengan memisahkan fungsi analisis pemasaran dan analisis risiko kredit.

Upaya yang dilakukan Bank dalam memperbaiki profil risiko kredit adalah monitoring atas debitur dan mengambil tindakan yang diperlukan agar kualitas kreditrinya tidak menjadi non-performing loans (NPL); melakukan penagihan secara intensif terhadap debitur bermasalah; melakukan kaji ulang dan mengevaluasi indikator aspek risiko dan aspek kepatuhan untuk mengevaluasi penerapan *four eyes principles* serta peringatan untuk pemberian kredit koperaasi; mengintensifkan rapat Komite Pemutus Kredit untuk pemberian kredit dengan plafon besar; dan secara kontinuitas memantau kredit dalam rangka ekspansi kredit yang sehat dan berkualitas.

Berikut ini adalah rasio kredit bermasalah dan rasio kualitas aset produktif Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	2 0 2 3	2 0 2 2	
Rasio NPL-bruto	2,87%	2,63%	NPL ratio - gross
Rasio NPL-bersih	1,23%	1,08%	NPL ratio - net
Rasio kualitas aset produktif	2,91%	2,50%	Earnings asset quality ratio

Sistem pengelolaan manajemen risiko kredit Bank telah dibakukan dalam suatu Pedoman Perusahaan (PP) dan dikaji secara periodik.

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan kredit lainnya,

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	2 0 2 3	2 0 2 2	
Giro pada Bank Indonesia	1.616.683.742.502	1.368.021.281.354	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	16.086.833.390	5.105.447.887	Current accounts with other banks
Pemepatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.344.801.996.519	1.399.713.706.562	Placements with Bank Indonesia and other banks
Kredit yang diberikan	12.474.212.215.068	11.815.129.416.598	Loans
Surat berharga	885.063.564.735	1.041.616.681.214	Marketable securities
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	287.049.382.743	Securities purchased under resale agreements
Jumlah - bruto	16.436.890.326.105	15.946.646.921.108	Total - gross
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(262.729.850.259)	(171.514.516.023)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	16.174.120.434.846	15.775.123.403.085	Total - net

Eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	2 0 2 3	2 0 2 2	
Garansi yang diberikan	80.521.273.891	111.770.272.702	Guarantees issued
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	334.230.088.604	577.816.340.727	Unused loans commitments granted to customers
Pihak ketiga	414.751.362.495	689.588.813.429	Third parties
Jumlah	414.751.362.495	689.588.813.429	Total

Tabel di atas menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya. Untuk aset laporan posisi keuangan, eksposur di atas ditentukan berdasarkan nilai tercatat bersih seperti yang diungkapkan pada laporan keuangan.

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

Loans systems and procedures of the Bank have been standardized to ensure the application of lending policies and practices consistently. For a productive loan, the Bank uses the Internal Credit Risk Rating models to analyze business and financial risk of the debtor objectively and give ratings to its customers. In addition, the Bank also uses the Credit Risk Capital Allocation and Pricing for quantifying credit risk and determine an appropriate price based on credit risk.

For consumer loans, the Bank uses the Internal Credit Scoring models to analyze and calculate the risks of granting consumer loans.

In order to apply the principle of healthy lending, the Bank applies the principle of Four Eyes (making loans decisions made by two or more persons) in each branch office by separating the functions of marketing analysis and credit risk analysis.

Efforts by the Bank in improving credit risk profile are the monitoring of borrowers and taking necessary actions so that the credit quality does not become non-performing loans (NPL); conduct an intensive collection of problematic debtors; conducted a review and evaluating indicators of risk aspects and compliance aspects to evaluate the application of four eyes principles and rating for cooperatives credit; intensify the Credit Approval Committee meeting for credit approval with a large plafond, and consistently monitor the credit in order to make qualified and healthy loans expansion.

The following are the non performing loans (NPL) ratio and the earnings asset quality ratio of the Bank As of December 31, 2023 and 2022:

The Bank credit risk management system has been standarized in the Company's Guidelines (PP) and reviewed periodically.

(i) The maximum credit risk exposure without calculating the collateral and other credit.

Credit risk exposure to the assets in the statement of financial position as of December 31, 2023 and 2022.

Credit risk exposure on the administrative accounts as of December 31, 2023 and 2022 is as follows:

The above table shows the maximum exposure to credit risk for the Bank as of December 31, 2023 and 2022 without calculating the collateral or other credit support. For the statements of financial position assets, the exposure is determined based on net carrying value as disclosed in the financial statements.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Manajemen yakin akan kemampuan Bank untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit yang berasal dari kredit yang diberikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Bank telah memiliki pedoman tertulis mengenai kebijakan dan proses kredit yang mencakup seluruh aspek pemberian kredit yang dilakukan. Setiap pemberian kredit harus senantiasa mengacu pada kebijakan tersebut.
- Bank telah memiliki sistem deteksi dini permasalahan melalui "early warning system" dan pantauan yang disiplin.

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit

Risiko konsentrasi kredit terjadi ketika sejumlah pelanggan bergerak dalam aktivitas usaha yang sejenis atau memiliki kegiatan usaha dalam wilayah geografis yang sama, atau memiliki karakteristik yang sejenis yang dapat menyebabkan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban kontrakualnya semuanya dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi ataupun kondisi lainnya.

a. Sektor geografis

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan area geografis pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Untuk tabel ini, Bank telah mengalokasikan eksposur area berdasarkan wilayah geografis nasabah atau counterparty.

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

Management believes on the Bank's ability to control and maintain the its credit risk exposure arising from loans based on the following:

- The Bank has written guidelines regarding credit policies and processes that cover all aspects of loans granted. Each granting of credit should always refer to such policy.

- The Bank has an early problem detection system through "early warning system" and disciplined monitoring.

(ii) Concentration of financial asset risk with credit risk exposure

Concentrations of credit risk arise when a number of customers are engaged in similar business activities or activities within the same geographic region, or when they have similar characteristics that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic or other conditions.

a. Geographical sectors

The following tables break down Bank's credit exposure at their carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit support), as categorised by geographical region as of December 31, 2023 and 2022. For these tables, Bank has allocated exposures to regions based on the customer or counterparty geographical area.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan exposur risiko kredit (lanjutan)

(a) Sektor geografis (lanjutan)

31 Desember/December 31, 2023			
Nusa Tenggara Timur	Jawa Timur/ East Java	DKI Jakarta	Lain-lain/ Others
			Jumlah/N Total
Aset			
Giro pada Bank Indonesia	12.115.213.701	-	1.615.683.742.502
Giro pada bank lain	-	29.870.593	3.940.799.096
Penerapan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	1.344.803.968.019	-
Kredit yang dibenarkan	12.474.212.215.959	-	-
Surat berharga	-	985.063.564.735	-
Jumlah - kotor	12.486.328.420.660	3.945.581.096.349	3.940.799.096
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	16.436.350.325.105
Jumlah - bersih	-	-	(252.729.850.259)
Total - net	16.174.120.434.846		16.174.120.434.846

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

(ii) Concentration of financial asset risk with credit risk exposure (continued)

(a) Geographical sectors (continued)

31 Desember/December 31, 2023			
Nusa Tenggara Timur	Jawa Timur/ East Java	DKI Jakarta	Lain-lain/ Others
			Jumlah/N Total
Assets			
Current accounts with Bank Indonesia	-	-	1.615.683.742.502
Current accounts with other banks	-	-	16.006.833.390
Placements with Bank Indonesia and other banks	-	-	-
Loans	-	-	-
Marketable securities	-	-	-
Total - gross	-	-	16.436.350.325.105
Allowance for impairment losses	-	-	(252.729.850.259)
Total - net	16.174.120.434.846		16.174.120.434.846

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tenggat-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali diroyatkan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

(a) Sektor geografis (lanjutan)

	31 Desember/December 31, 2022			
	Nusa Tenggara Timur	Jawa Timur/ East Java	DKI Jakarta	Lain-lain/ Others
				Jumlah/ Total
Aset				
Giro pada Bank Indonesia	-	1.398.021.281.334	-	1.398.021.281.334
Giro pada bank lain	-	1.522.327.767	3.226.771.876	5.106.447.657
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	1.399.713.709.562	-	1.399.713.709.562
Kredit yang dibenarkan	11.815.129.418.598	-	-	11.815.129.418.598
Surat berharga	-	1.041.616.651.214	-	1.041.616.651.214
Surat berharga yang dibeli dengan jangka dijual kembali	-	267.049.392.743	-	267.049.392.743
Jumlah - kotor	11.815.129.418.598	357.348.025	3.840.873.698.867	3.226.771.876
Penyisihan kerugian penurunan nilai				15.946.046.941.108
Jumlah - bersih				(171.514.518.023)
				15.775.132.403.085

Credit risk (continued)	(ii) Concentration of financial asset risk with credit risk exposure (continued)	(a) Geographical sectors (continued)
Assets		
Current accounts with Bank Indonesia		
Current accounts with other banks		
Placements with Bank Indonesia and other banks		
Loans		
Marketable securities		
Securities purchased under resale agreements		
Total - gross		
Alliance for impairment losses		
Total - net		

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(i) Konsentrasi risiko aset kuarangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

(a) Sektor geografis (lanjutan)
Eksposur risiko kredit terhadap sektor administratif pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Nusa Tenggara Timur	31 Desember/December 31, 2023			Bank guarantee issued Total
	Jawa Timur/ East Java	DKI Jakarta	Lain-lain/ Others	
80.621.273.891	-	-	-	80.621.273.891
334.230.088.604	-	-	-	334.230.088.604
414.751.362.495	-	-	-	414.751.362.495

Nusa Tenggara Timur	31 Desember/December 31, 2022			Bank guarantee issued Total
	Jawa Timur/ East Java	DKI Jakarta	Lain-lain/ Others	
111.770.272.702	-	-	-	111.770.272.702
577.818.340.727	-	-	-	577.818.340.727
689.588.613.429	-	-	-	689.588.613.429

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

(b) Sektor Industri

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri.

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

(ii) Concentration of financial asset risk with credit risk exposure (continued)

(b) Industry sector

The following table describes the details of the Bank's credit exposure at the carrying amount (without calculating collateral or other credit support), which are categorized by industry sector.

31 Desember/December 31, 2023

Pemerintah (termasuk Bank Indonesia) / Government (including Bank Indonesia)	Lembaga keuangan bukan bank / Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya / Other companies	Perseroorangan / Individuals	Jumlah / Total	
Giro pada Bank Indonesia	1.516.883.742.502	-	-	-	1.516.883.742.502
Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	10.080.013.390	-	-	-	10.080.013.390
Kredit yang diberikan Surat berharga	1.344.803.968.519 34.124.672 8.000.000.000	123.442.178.851 1.466.475.049.707 -	10.726.657.632.198 -	-	1.344.803.968.519 12.474.212.215.989 985.063.564.735
Jumlah - bruto	2.751.350.337.908	1.360.924.926.581	123.442.178.651	1.466.475.049.707	10.726.657.632.198
Penyisihan					16.438.850.325.105
Jumlah - bersih					(262.729.890.259)
					16.174.120.434.846

Total - gross
Allowance
Total - net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)
(ii) Konsentrasi risiko asset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

- (b) Sektor Industri (lanjutan)
Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor Industri (lanjutan).

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)
(ii) Concentration of financial asset risk with credit risk exposure (continued)

- (b) Industry sector (continued)
The following table describes the details of the Bank's credit exposure at the carrying amount (without calculating collateral or other credit support), which are categorized by Industri sector (continued).

31 Desember/December 31, 2022

Pemerintah (termasuk Bank Indonesia) / Government (including Bank Indonesia)	Bank / Banks	Lembaga keuangan bukan bank / Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya / Other companies	Perseorangan / Individuals	Jumlah / Total	
Giro pada Bank Indonesia	1.398.021.281.334	-	-	-	-	1.398.021.281.334
Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5.106.447.657	-	-	-	-	5.106.447.657
Kredit yang dibekalkan Surat berharga Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.399.713.709.562 113.432.289.648 1.033.616.681.214 287.045.382.743	113.530.544 8.000.000.000	74.120.002.546 - - 13.219.971.181	1.447.778.370.463 - - 74.120.002.546	10.179.694.415.417 - - - 10.179.694.415.417	1.399.713.709.562 11.016.139.416.598 1.041.616.681.214 287.045.382.743 10.179.694.415.417
Jumlah - bruto	4.231.833.354.801					(171.514.518.023)
Penyisihan						15.946.646.921.108
Jumlah - bersih						15.775.132.403.086
						Total - net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

- Risiko kredit (lanjutan)**
 (ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)
 Eksposur risiko kredit atas rekening administratif adalah sebagai berikut:

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

- (ii) Concentration of financial asset risk with credit risk exposure (continued)
 Credit risk exposure on the administrative accounts are as follows:

2023			
Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorongan / Individuals	Jumlah/ Total	
80.521.273.891	-	80.521.273.891	Guarantees issued Unused loans commitments granted to customers <i>Total</i>
280.669.991.048	73.560.097.556	354.230.088.604	
341.191.264.939	73.560.097.556	414.751.362.495	

2022			
Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorongan / Individuals	Jumlah/ Total	
108.043.999.152	3.726.273.550	111.770.272.702	Guarantees issued Unused loans commitments granted to customers <i>Total</i>
469.799.506.724	108.018.834.003	577.818.340.727	
577.843.505.876	111.745.107.553	689.588.613.429	

Garansi yang diterbitkan
 Fasilitas kredit kepada debitur
 yang belum digunakan
 Jumlah

Garanties issued
 Unused loans commitments
 granted to customers
Total

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 30, No. 2, March 2005
DOI 10.1215/03616878-30-2 © 2005 by The University of Chicago

36 *Journal of Aging Studies* 4 (1990)

a. *Hilario* (red II) (purple)

Wieder wird ein Ziel benötigt!
Dabei kommt manchmal kein Ziel
einfach lange vorne heraus.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

Dalam hal terdapat keraguan terhadap kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran kontraktual pada saat jatuh tempo, persyaratan kredit dapat dinegosiasikan kembali berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah.

Dampak langsung dan tidak langsung atas pandemik COVID-19 mempengaruhi perekonomian global, pasar, dan pihak lawan maupun debitur dari Bank. COVID-19 diperkirakan merupakan krisis jangka pendek dan manajemen telah melakukan langkah-langkah untuk memitigasi dampak terhadap bisnis Bank sebagai berikut:

- Mempersiapkan skema restrukturisasi kredit untuk debitur yang berdampak COVID-19.
- Melakukan penyaluran kredit yang diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
- Meningkatkan upaya peragihan dan penyelesaian kredit bermasalah.
- Melakukan efisiensi biaya operasional.
- Menerapkan manajemen risiko likuiditas secara optimum untuk menjaga posisi likuiditas Bank.

Sehubungan dengan hal tersebut, pihak regulator juga telah mengeluarkan beberapa peraturan baru yaitu, antara lain:

- POJK No.11/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19 yang bertujuan untuk mendorong optimisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
- Surat pers OJK No.SP28/DHMSOJK/IV/2020 tentang Panduan Penerapan PSAK 71 dan PSAK 68 untuk Perbankan di Masa Pandemi COVID-19 tanggal 16 April 2020.

Manajemen telah melakukan evaluasi dampak pandemi COVID-19 terhadap perhitungan kerugian kredit ekspektasi, antara lain penyesuaian terhadap variable ekonomi makro yang mempengaruhi kerugian kredit ekspektasi 12 bulan (Stage 1) dan kerugian kredit ekspektasi sepanjang umur aset keuangan (Stage 2). Mengingat model perhitungan kerugian kredit ekspektasi tidak sepenuhnya dapat menghasilkan estimasi kerugian yang akurat dalam kondisi ekonomi yang abnormal, maka Manajemen juga sudah memperhitungkan beberapa faktor penyesuaian untuk memastikan nilai kerugian kredit ekspektasi yang diajukan dalam laporan keuangan dinyatakan secara wajar.

Dalam menilai kondisi masa depan, manajemen telah mempertimbangkan berbagai informasi relevan yang tersedia, termasuk kebijakan COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung dan mengurangi dampak penyebaran COVID-19 terhadap perekonomian, dan mendorong Bank untuk menunda atau merestrukturisasi pinjaman. Dalam kondisi normal, perjadwalan ulang atau restrukturisasi pinjaman akan menunjukkan peningkatan risiko kredit yang signifikan dan pindah ke Stage 2. Namun, dalam kondisi saat ini dan sejalan dengan panduan yang ditularkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, manajemen telah mempertimbangkan bahwa restrukturisasi atau peristiwa mungkin tidak secara otomatis memicu peningkatan risiko kredit yang signifikan jika pembiayaan diharapkan untuk memulihkan dan memenuhi kewajiban kontraktual mereka setelah akhir periode restrukturisasi atau relaksasi.

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

(ii) Credit quality of financial assets (continued)

Where there is doubt on the ability of the borrowers to meet contractual payments when due, the terms of the loans might be renegotiated based on mutual agreement between the Bank and the borrowers.

Direct and indirect effects of the COVID-19 outbreak are impacting the global economy, markets, and the counterparties and debtor of the Bank. COVID-19 is expected to be short-term crisis (V-curve crisis) and management has taking actions to mitigate the impacts on the Bank's business as follow:

- Establish various restructuring scheme which can considered for customers affected by COVID-19.
- Provide loans to customers selectively with prudent principles.
- Increase efforts on collections and settlements of non-performing loans.
- Manage operational expenses efficiently.
- Implement liquidity risk management optimally to secure the Bank's liquidity position.

In relation to these, the regulators has also issued several new regulations as follows:

- POJK No.11/POJK.03/2020 dated March 16, 2020 regarding National Economy Stimulus as the COVID-19 Outbreak Impact Countercyclical Policy with the objective to push the optimization of bank's performance specifically for the intermediation function, manage the stability of the financial system, and support the economic growth.
- OJK press release No.SP28/DHMSOJK/IV/2020 concerning Guidelines for the Implementation of PSAK 71 and PSAK 68 for Banking during the COVID-19 Pandemic dated April 16, 2020.

Management has evaluated the impact of the COVID-19 pandemic on calculating expected credit loss, including adjustments to macroeconomic variables that affect 12-month expected credit losses (Stage 1) and expected credit losses over the life of the financial assets (Stage 2). Considering that the expected credit loss calculation model cannot produce an accurate estimation of losses in abnormal economic conditions, management has also taken into account several adjustment factors to ensure the expected value of the expected credit loss recognized in the financial statements is stated fairly.

In assessing future conditions, management has considered various relevant information available, including COVID-19 policies issued by the government to support and mitigate the impact of the spread of COVID-19 on the economy, and encouragement for banks to defer or restructure loans. Under normal conditions, a rescheduling or restructuring of a loan would indicate a significant increase in credit risk and a move to Stage 2. However, in the current condition and in line with guidance issued by the Indonesia Institute of Accountants, management have considered that such a restructuring or event may not automatically trigger a significant increase in credit risk if the borrower would be expected to recover and fulfill their contractual obligations after the end of the restructuring or relaxation period.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

Asumsi dan pertimbangan utama dalam menentukan kerugian kredit ekspektasi.

Variabel Makro Ekonomi (MEV)

Lingkungan ekonomi yang berkembang adalah penentu utama dari kemampuan nasabah Bank untuk memenuhi kewajiban mereka saat jatuh tempo. Ini adalah prinsip dasar PSAK 71 bahwa potensi kerugian kredit di masa depan harus bergantung tidak hanya pada kesehatan ekonomi saat ini, tetapi juga harus memperhitungkan kemungkinan perubahan pada lingkungan ekonomi. Misalnya, jika Bank mengantisipasi perlambatan tajam dalam ekonomi dunia, Bank harus membentuk lebih banyak cadangan hari ini untuk menyerap kerugian kredit yang kemungkinan akan terjadi dalam waktu dekat.

Untuk menangkap efek perubahan pada lingkungan ekonomi, model PD digunakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasi dengan memasukkan informasi forward looking dalam bentuk perkiraan nilai-nilai variabel ekonomi yang kemungkinan akan berdampak pada kemampuan pembayaran kembali nasabah Bank.

Berbagai MEV digunakan untuk setiap model PD, tergantung pada hasil analisis statistik kesesuaian MEV dengan PD serta konsensus dari pakar kredit. Di antaranya adalah nilai tukar Dolar Amerika Serikat ke Rupiah dan suku bunga BI.

Bank menggunakan metode pemodelan untuk memproyeksikan MEV di masa depan. Bank menggunakan 3 skenario untuk pemodelan, yaitu normal, batas prediksi bawah dan batas prediksi atas. Bank akan memberikan bobot pada ketiga skenario tersebut untuk mempersiapkan proyeksi dasar untuk setiap MEV. Semua proyeksi diperbarui setiap satu tahun.

Sensitivitas MEV terhadap ECL

Perhitungan ECL bergantung pada beberapa variabel dan pada dasarnya tidak linear dan tergantung pada portofolio, yang menyiratkan bahwa tidak ada analisis tunggal yang dapat sepenuhnya menunjukkan sensitivitas kerugian kredit ekspektasi terhadap perubahan dalam MEV. Bank berkeyakinan bahwa sensitivitas harus dilakukan terhadap seluruh variabel, alih-alih variabel tunggal, karena hal ini sejalan dengan sifat multi-variabel dari perhitungan ECL.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan antara lain oleh ketidakmampuan Bank dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan likabilitas keuangan yang telah jatuh tempo dan menutup posisi di pasar. Kebijakan likuiditas Bank dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dana dapat dipenuhi, baik untuk membayar deposito pada saat jatuh tempo atau untuk memenuhi fasilitas kredit yang belum digunakan. Risiko likuiditas merupakan risiko yang terpenting pada bank umum dan perlu dikelola secara berkesinambungan. Pengelolaan dan pemantauan posisi likuiditas Bank berada dalam tanggung jawab Divisi Treasury.

Risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aset yang pada umumnya berjangka panjang. Besar kecilnya risiko likuiditas ditentukan antara lain:

- (i) Kecermatan dalam perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembilangan dan prediksi pertumbuhan dana termasuk mencermati tingkat volatilitas dana;
- (ii) Ketepatan dalam mengatur struktur dana termasuk kecukupan dana;
- (iii) Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas; dan
- (iv) Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya.

38. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

(ii) Credit quality of financial assets (continued)

Key assumptions and judgments in determining expected credit loss

Macro Economic Variable (MEV)

The developing economic environment is the key determinant of the ability of a Bank's customer to meet their obligations as they fall due. It is a fundamental principle of PSAK 71 that the potential future credit losses should depend not just on the health of the economy today, but should also take into account potential changes to the economic environment. For example, if the Bank was to anticipate a sharp slowdown in the world economy, Bank should make more provisions today to absorb the credit losses likely to occur in the near future.

To capture the effect of changes in the economic environment, PD model is used to calculate expected credit loss, by incorporating forward-looking information in the form of forecasts of the values of economic variables that are likely to have an effect on the repayment ability of the Bank's customer.

Various of MEVs are used for each PD model, depending on the statistical analysis result of appropriateness of the MEV with PD as well as consensus from credit expert. Amongst others are USD to IDR exchange rate and BI rate.

The Banks uses modeling method to forecast the MEV in the future. The Bank uses 3 modeling scenarios, i.e. normal, lower prediction limit and upper prediction limit. The Bank will give weight to all three scenarios to obtain the base forecast for each MEV. All projections are updated on a yearly basis.

Sensitivity of MEV to ECL

The ECL calculation relies on multiple variables and is inherently non-linear and portfolio-dependent, which implies that no single analysis can fully demonstrate the sensitivity of the expected credit loss to changes in the MEVs. The Bank believes that sensitivity should be performed to all variables, instead of single variable, as this aligns with the multi-variable nature of the ECL calculation.

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that caused by the inability of the Bank in meeting obligations associated with financial liabilities that are due and closing positions in the market. The Bank's liquidity policy is intended to ensure that the funding requirements can be met, either to pay the deposit at maturity or to meet the unused loans facilities. Liquidity risk is the risk that the most important in commercial banks and need to be managed sustainably. Management and monitoring of the Bank's liquidity position is within the responsibility of the Treasury Division.

The risk of loss resulting from the gap between short-term funding and long term assets. The size of the liquidity risk is determined, i.e.:

- (i) Accuracy in cash flow or flow of fund planning based on financing and fund growth prediction, include observe the fund rate volatility;
- (ii) The precision in managing the fund structure, including the adequacy of funding;
- (iii) To be availability of asset that is ready to be converted into cash; and
- (iv) Ability to create access to the interbank market or other funding sources.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Apabila kesenjangan tersebut cukup besar maka akan menununkan kemampuan Bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu untuk mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, maka diperlukan manajemen likuiditas, yang merupakan bagian dari pengelolaan liabilitas.

Kebijakan likuiditas Bank ditujukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dana dapat dipenuhi, baik untuk membayar deposito pada saat jatuh tempo atau untuk memenuhi fasilitas kredit yang belum digunakan.

Pengelolaan dan pemantauan posisi likuiditas Bank berada dalam tanggung jawab Satuan Kerja Likuiditas sedangkan pengukuran serta analisa terhadap kondisi likuiditas menjadi tugas Divisi Manajemen Risiko diantaranya stress test likuiditas berdasarkan skenario dan pembuatan profil risiko yang terkait likuiditas.

Pengelolaan kelebihan dana likuiditas yang tidak terserap penyaluran kredit teroptimalkan melalui pengelolaan treasury. Sebagian besar kelebihan dana likuiditas tersalurkan melalui instrumen-instrumen yang berjangka pendek dan aman. Umumnya, kondisi likuiditas bank terjaga baik dimana penarikan dana nasabah dapat terpenuhi sekaligus kelebihan dana teroptimalkan dengan imbal hasil yang optimal.

Sumber dana dan waktu jatuh tempo deposito diketahui untuk menghindari adanya dana yang idle dan menentukan jumlah serta instrumen aset likuid yang tepat untuk menjamin tingkat likuiditas yang terkendali secara terus menerus.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis jatuh tempo aset dan liabilitas Bank dihitung berdasarkan sisa periode jatuh tempo kontrak pada tanggal laporan posisi keuangan:

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk (continued)

If the gap is large enough it will reduce it will reduce the Bank ability to meet its liabilities at maturity. Therefore, liquidity management is needed to anticipate liquidity risk, which is a part of the management liability.

The Bank's liquidity policies are aimed at ensuring that fund requirements can be fulfilled, either to pay deposits at maturity or to fulfill additional loans on request.

Maintaining and monitoring the Bank's liquidity position is the responsibility of the Liquidity Unit while measuring and analysing on liquidity condition is the responsibility of the Risk Management Division which among others include liquidity stress test based on scenarios and preparing risk profile related to liquidity risk.

Managing the excess of liquidity fund which are not absorbed by credits will be optimized through managing treasury. Most of the excess of liquidity will be placed in short-term and secured instruments. In general the Bank's liquidity condition is well maintained where the customers withdrawal can be fulfilled while the excess fund can be optimized with optimum return.

Sources of funds and maturity dates of deposits are managed to avoid idle funds and determine the appropriate liquidity level and liquid asset instrument to ensure a sustainable liquidity level.

The following table illustrates the maturity profile analysis of the Bank's assets and liabilities according to their remaining maturity period at the statement of financial position date:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk (continued)

	Nilai tercatat/ Carrying value	31 Desember / December 31, 2023					Rp juta/Rp million
		Lain-lain/ Others	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	> 1-3 bulan/ > 1-3 months	> 3-6 bulan/ > 3-6 months	> 6-12 bulan/ > 6-12 months	
Assets							
Kas	526.952	526.952	-	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	1.616.684	-	1.616.684	-	-	-	-
Giro pada bank lain - bruto	16.087	-	16.087	-	-	-	-
Penerimaan pada Bank Indonesia dan bank lain - bruto	1.344.804	-	1.344.804	-	370.493	344.419	2.626.308
Kredit yang diberikan - bruto	12.474.212	-	329.402	322.627	-	94.592	268.712
865.064	-	-	19.730	-	-	-	-
Surat berharga - bruto	206.043	206.043	-	-	-	-	-
Aset tetap - bersih	1.037	1.037	-	-	-	-	-
Aset takberwujud - bersih	80.527	80.527	-	-	-	-	-
Aset hak guna	37.635	37.635	-	-	-	-	-
Aset pajak tangguhan	299.129	210.240	88.888	-	-	-	-
Aset lain-lain	17.688.172	1.062.434	3.195.165	342.397	370.493	781.804	611.161
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(202.720)						2.906.752
	17.325.445						8.115.206
Allowance for impairment losses							

P.T BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dimuatkan lain)

1) Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Differences in maturity
Position net of allowance for impairment losses

P.T BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

335. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

36 RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk (continued)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Bank telah membangun model pengukuran risiko likuiditas untuk mengukur risiko likuiditas dari portofolio aset dan liabilitas Bank, dan memberikan jaminan keamanan tambahan berdasarkan skenario terbaik (best case), terburuk (worst case) dan paling mungkin terjadi (most probable case) serta optimisasi rapat Asset-Liability Committee (ALCO) yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan likuiditas Bank.

Untuk mengejala maturity gap, Bank mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan terhadap adanya pencatatan dan penempatan dana setiap hari;
- Memberikan tingkat bunga yang lebih tinggi kepada nasabah utama;
- Menjaga hubungan baik dengan para depositor agar tetap menambahkan danaanya pada Bank;
- Menerbitkan instrumen utang berupa obligasi;
- Menetapkan batas maksimum dan minimum kas pada kantor cabang operasional;
- Menetapkan batas maksimal giro antar bank.

Risiko pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan faktor pasar dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank (*adverse movement*). Yang dimaksud dengan faktor pasar adalah suku bunga.

Risiko suku bunga timbul dari berbagai layanan perbankan Bank bagi nasabah termasuk deposito, kredit yang diberikan dan fasilitas giro. Bank juga melakukan aktivitas investasi terbatas untuk kepentingan sendiri.

Bank melakukan pengukuran risiko suku bunga dengan menggunakan metodologi yang dapat mengidentifikasi risiko suku bunga dari portofolio aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan suku bunga serta menentukan besaran risiko terhadap Bank.

Tabel di bawah ini merupakan kisaran singkat bunga per tahun untuk aset dan liabilitas yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	2023	2022	
Aset			Assets
Giro pada bank lain	0,00% - 1,50%	0,00% - 1,50%	Current accounts with other banks
Pembiayaan pada Bank Indonesia dan bank lain	5,00% - 5,25%	2,75% - 3,50%	Placements with Bank Indonesia and other banks
Kredit yang diberikan	4,00% - 22,00%	1,00% - 22,00%	Loans
Surat berharga	4,00% - 7,75%	2,17% - 7,75%	Marketable securities
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	3,00% - 3,50%	Securities purchased under resale agreements
Liabilitas			Liabilities
Simpanan nasabah			Deposits from customers
- Giro	0,00% - 1,00%	0,00% - 1,50%	Current accounts -
- Tabungan	0,00% - 2,50%	0,00% - 1,75%	Saving deposits -
- Deposito berjangka	2,25% - 8,00%	3,00% - 8,00%	Time deposits -
Simpanan dari bank lain			Deposits from other banks
- Giro	0,00% - 1,25%	0,00% - 1,50%	Current accounts -
- Tabungan	0,00% - 1,25%	0,00% - 1,75%	Saving deposits -
- Deposito berjangka	3,00% - 3,75%	3,00% - 4,25%	Time deposits -
- Negotiable Certificate of Deposit	-	7,10% - 7,20%	Negotiable Certificate of Deposit -
Surat berharga yang diterbitkan	10,75% - 11,00%	10,75% - 11,00%	Securities issued

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk (continued)

Bank has built liquidity risk measurement model for measuring the liquidity risk of the portfolio of assets and liabilities of the Bank, and provide additional security guarantees based on the best-case scenario (best case), worst (worst case) and most likely to occur (most probable case) as well as the optimization of Asset-Liability Committee (ALCO) meeting which responsible for managing the Bank's liquidity.

To manage the maturity gap, the Bank take the following steps:

- Monitor the presence and placement of disbursement of funds on a daily basis;
- Provide higher interest rate to major customers;
- Maintain good relations with the depositors to keep adding funds to the Bank;
- Issue debt instruments in the form of bonds;
- Set maximum and minimum cash at the branch office operations;
- Setting a limit on inter-bank current accounts.

Market risk

Market risk is the risk arising from movement in market variables in portfolios held by the Bank that could incur losses for the Bank (*adverse movement*). Market variables is defined as interest rates.

Interest rate risk arising from the Bank's range of banking services for customers, including deposits, loans and current account facilities. The Bank also make limited investment activity for its own interests.

The Bank conducts the measurement of interest rate risk by using a methodology that can identify the interest rate risk of the portfolio of assets and liabilities that are sensitive to changes in interest rates and to determine the amount of risk to the bank.

The table below summarizes the range of interest rates per annum for significant assets and liabilities as of December 31, 2022 and 2023:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)
Risiko pasar [lanjutan]
Tabel di bawah ini mengilustrasikan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga
(gross) (tidak diaudit):

36. RISK MANAGEMENT (continued)
Market risk (continued)

The following table summarizes the Bank's exposure to the interest rate risk (gross) (unaudited):

		Bunga tetapi/Fixed interest							
		Lebih dari 1 bulan tapi tidak lebih dari 1 tahun/			Lebih dari 1 tahun/				
		Lebih dari 1 bulan atau kurang/	1 tahun/	More than 3 months but not more than 1 year	Lebih dari 1 tahun/	More than 3 months but not more than 1 year	Lebih dari 2 tahun/	More than 2 years	Jumlah/
		1 month	3 months	1 year	1 month	3 months	1 year	2 years	Total/
Aset									
Giro pada Bank Indonesia	1,616,684	-	-	-	-	-	-	-	1,616,684
Giro pada bank, lain	(16,007)	-	-	-	-	-	-	-	16,007
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	-	1,344,004	-	-	-	1,344,004
Kredit yang diberikan	12,205,710	-	-	-	-	-	-	-	12,205,710
Surat berharga	-	-	-	-	-	19,730	94,592	268,742	801,989
Jumlah aset keuangan	13,938,491	-	-	-	1,344,004	19,730	94,592	268,742	780,591
Liabilitas									
Simpanan nasabah	6,555,057	-	-	-	250,062	100,225	110,831	5,801,673	-
Simpanan dari bank lain	359,795,20	-	-	-	440	-	5,500	-	359,795,20
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	-	36,917	-
Penerimaan yang diterima	6,914,852	-	-	-	-	500,000	-	176,019	396,994
Jumlah gap repricing suku bunga	7,075,620	-	-	-	259,102	600,225	126,431	6,074,006	14,373,312
Total gap repricing interest rate									
					1,045,702	(640,495)	(30,039)	(5,746,066)	381,407
									2,603,838

Assets
Current account with Bank Indonesia
Current account with other banks
Placements with Bank Indonesia
and other banks
Loans
Marketable securities
Total financial assets

Liabilities
Deposits from customers
Deposits from other banks
Securities issued
Borrowings

36. MANAJEMEN RISIKO (Banjalan)

Risiko pasar (lanjutan)
Tabel di bawah ini menghitung risiko (gross) (disebabkan oleh) (netto)

Bunga mengambang/ <i>Floating interest</i>										Bunga tetap/ <i>Fixed interest</i>	
		Lebih dari 1 bulan tapi tidak lebih dari 3 bulan/ 1 bulan atau kurang/ less than 3 months		Lebih dari 1 tahun/ More than 3 months but not more than 3 months		Lebih dari 1 tahun atau kurang/ less than 1 year		Lebih dari 3 bulan tapi tidak lebih dari 3 bulan/ 1 tahun atau kurang/ less than 1 year		Lebih dari 3 bulan/ More than 3 months but not more than 1 year	
Asset											
Giro pada Bank Indonesia	1,366.021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,398.021
Giro pada bank lain	5.109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.109
Pemungutan pada Bank Indonesia dan bank lain	11.629.125	-	-	-	-	1.399.714	-	-	-	-	1.399.714
Kredit yang diberikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat berharga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat berharga yang diberikan jANJI dijual kembali	-	-	-	-	-	0.342	34.000	30.408	84.249	863.937	1.041.617
Jumlah aset kawangan	13.032.253	-	-	-	-	287.049	-	-	-	-	287.049
Liabilitas						1.595.105	34.000	30.498	94.259	1.049.651	16.846.847
Simpanan nasabah	8.216.265	-	-	-	-	287.905	410.173	400.506	6.436.377	-	12.799.276
Simpanan dari bank lain	488.409	-	-	-	-	2.440	-	5.000	-	9.517	503.306
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.767	116.767
Piutang yang diterima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610.337	610.337
Jumlah gap repricing suku bunga	6.704.674	-	-	-	-	270.195	416.173	425.506	5.436.377	738.611	14.029.736
	5.327.579	-	-	-	-	1.425.711	(381.293)	(426.007)	(5.342.116)	213.040	1.816.911

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

36. MANAJEMEN RISIKO (Janjutan)**Risiko pasar (Janjutan)**

Analisis sensitivitas untuk beberapa faktor pasar menunjukkan bagaimana laba rugi dan ekuitas dapat dipengaruhi oleh perubahan dari beberapa faktor risiko tertentu dengan tabel di bawah ini. Secara umum, sensitivitas diestimasi dengan membandingkan suatu nilai awal ke nilai tertentu setelah perubahan tertentu dari faktor pasar, dengan mengasumsikan seluruh variabel lainnya tetap. Sensitivitas atas laporan laba rugi merupakan efek atas perubahan estimasi suku bunga atas laba rugi untuk suatu periode, berdasarkan nilai suku bunga mengambang atas aset dan liabilitas yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan yang dimiliki Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Tabel di bawah ini menunjukkan sensitivitas dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Bank terhadap kemungkinan perubahan wajar atas suku bunga untuk aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga tetap pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

36. RISK MANAGEMENT (continued)**Market risk (continued)**

Sensitivity analysis for several market factors showing how profit or loss and equity could be affected by changes in the relevant risk factor are in the following tables below. In general, sensitivity is estimated by comparing an initial value to the value derived after a specified change in the market factor, assuming all other variables are constant. The sensitivity of the statement of profit or loss is the effect of the assumed changes in interest rates on the profit or loss for a period, based on the floating rate trading and non-trading financial assets and liabilities held by the Bank as of December 31, 2023 and 2022.

The table below demonstrates the sensitivity of the Bank's statement of profit or loss and other comprehensive income to reasonably possible changes in interest rates for fixed rate financial assets and liabilities as of December 31, 2023 and 2022.

Dampak ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain/Impact to statement of profit or loss and other comprehensive income

Perubahan basis point/ Change in basis point	2023		2022	
	+1,00%	-1,00%	+1,00%	-1,00%
+1,00%	74.280	69.450	74.280	69.450
-1,00%	(74.280)	(69.450)	(74.280)	(69.450)

Posisi Devisa Neto (PDN)

Perhitungan posisi devisa neto bank berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No.12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010 dan Peraturan Bank Indonesia No.17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia No.5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. Berdasarkan peraturan tersebut, mulai tanggal 1 Juli 2010, Bank hanya dikenakan untuk menjaga posisi devisa neto secara keseluruhan maksimum 20% dari total modal.

PDN adalah jumlah dari nilai absolut selisih bersih aktiva dan pasiva dalam laporan posisi keuangan untuk setiap valuta asing dan selisih bersih tagihan dan kewajiban komitmen dan konfidenji dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

Berikut adalah Posisi Devisa Neto Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dalam mata uang (ekuivalen Rupiah). Nilai ini adalah yang dilaporkan kepada Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan sebagai bagian dari laporan harian.

Net Open Position (NOP)

The calculation of the net open position of banks is based on Bank Indonesia Regulation No.12/10/PBI/2010 dated July 1, 2010 and Bank Indonesia Regulation No.17/5/PBI/2015 dated May 29, 2015 concerning the Fourth Amendment to Bank Indonesia Regulation No.5/13/PBI/ 2003 concerning the Net Open Position of Commercial Banks. Based on this regulation, starting on July 1, 2010, the Bank is only required to maintain a net open position as a whole at a maximum of 20% of total capital.

NOP is the sum of the absolute values of the net difference between assets and liabilities in the statement of financial position for each foreign currency and the net difference of receivables and commitments and contingent liabilities in the administrative accounts for each foreign currency, which are all stated in Rupiah.

Below is the Net Open Position of Bank as of December 31, 2023 in currency (Rupiah equivalent). These amounts are reported to Bank Indonesia on the statement of financial position's date as part of daily reporting.

2023

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Mata uang	Aset/ Assets	Likabilitas/ Liabilities	Nilai absolut bersih/ Net absolute value	Currencies
Posisi keuangan:				
Dolar Amerika Serikat	16.600	630	16.160	Financial position United States Dollar
Dolar Australia	53	-	53	Australian Dollar
Euro	37	-	37	Euro
Dolar Singapura	4	-	4	Singapore Dollar
	16.653	630	16.263	
Rekening administrasi:				Administrative accounts
Dolar Amerika Serikat	-	-	-	United States Dollar
Jumlah:			16.263	Total
Jumlah modal			2.429.864	Total capital
Rasio Posisi Devisa Neto (PDN)			0,67%	Net Open Position (NOP) ratio

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**Risiko pasar (lanjutan)**

Eksposur Bank atas risiko nilai tukar mata uang asing
Tabel dibawah ini menghitruskan eksposur Bank atas risiko nilai tukar mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2023. Termasuk di dalamnya adalah instrumen keuangan Bank pada nilai tercatat, dikategorikan berdasarkan jenis mata uang.

	2023					
	Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar	Dolar Singapura/ Singapore Dollar	Dollar Australia/ Australian Dollar	Euro Eropa/ European Euro	Jumlah/ Total	
Aset						
Kas	326.937.988	4.086.719	52.761.662	36.802.771	420.589.140	Assets
Giro pada Bank Indonesia	5.388.950.000	-	-	-	5.388.950.000	Cash Current account with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	11.083.684.420	-	-	-	11.083.684.420	Current account with other banks
	16.799.572.408	4.086.719	52.761.662	36.802.771	16.893.223.560	
Liabilitas						Liabilities
Simpanan dari nasabah	630.187.354	-	-	-	630.187.354	Deposits from customers
	630.187.354	-	-	-	630.187.354	
Laporan posisi keuangan - bersih	16.169.385.054	4.086.719	52.761.662	36.802.771	16.263.038.206	Statement of financial position - net
Laporan posisi keuangan - bersih (absolut)	16.169.385.054	4.086.719	52.761.662	36.802.771	16.263.038.206	Statement of financial position - net (absolute)

Saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

	2023	Mata uang asing/ Foreign Currencies	
	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah Equivalent		
Aset			Assets
Kas			Cash
Dolar Amerika Serikat	326.937.988	21.234	United States Dollar
Dolar Singapura	4.086.719	350	Singapore Dollar
Dolar Australia	52.761.662	5.015	Australian Dollar
Euro	36.802.771	2.180	Euro
Giro pada Bank Indonesia			Current account with Bank Indonesia
Dolar Amerika Serikat	5.388.950.000	350.000	United States Dollar
Giro pada bank lain			Current accounts with other banks
Dolar Amerika Serikat	11.083.684.420	719.860	United States Dollar
Jumlah aset	16.893.223.560	1.000.619	Total assets
Liabilitas			Liabilities
Simpanan dari nasabah			Deposits from customers
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
Tabungan	630.187.354	40.929	Saving deposits
Jumlah liabilitas	630.187.354	40.929	Total Liabilities

Tujuan dari manajemen risiko pasar adalah untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pengefoloan eksposur risiko pasar dalam parameter yang dapat diterima, serta memaksimalkan tingkat pengembalian.

Pengelolaan risiko pasar banking book dilakukan dengan mengoptimalkan struktur laporan posisi keuangan Bank untuk mendapatkan imbal hasil yang maksimal sesuai tingkat risiko yang dapat diterima Bank. Pengendalian risiko pasar banking book dilakukan dengan menetapkan limit yang mengacu pada ketentuan regulator dan internal yang dimonitor secara berkala oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.

The objective of market risk management is to identify, measure, control and manage the market risk exposures within acceptable parameters, while maximizing returns.

Banking book market risk management is carried out by optimizing the structure of the Bank's financial position report to get maximum returns according to the level of risk that is acceptable to the Bank. Banking book market risk control is carried out by setting limits that refer to regulatory and internal provisions that are monitored regularly by the Risk Management Work Unit.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan dan proses internal, faktor manusia dan sistem atau dari kejadian-kejadian eksternal.

Risiko ini melekat dalam sensus proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan produk Bank, dan mulai Kantor Pusat sampai seluruh jaringan kantor. Kegagalan mengebia risiko operasional dapat menyebabkan kerugian finansial, keselamatan karyawan dan reputasi Bank.

Untuk mengawasi risiko operasional yang mungkin terjadi, Bank telah mengembangkan suatu sistem dengan menggunakan metodologi pengukuran sendiri (*self assessment*) yang dilakukan oleh masing-masing risk owner, sehingga dapat dibentuk suatu peta risiko yang mungkin terjadi di setiap unit kerja.

Dengan peta risiko, risiko operasional dapat diukur (*high, medium, atau low*), sehingga manajemen dapat melakukan pengendalian terhadap dampak risiko yang timbul. Untuk mengalokasikan kebutuhan modal risiko operasional, sesuai dengan Basel Committee on Banking Supervision, serta roadmap implementasi Basel II di Indonesia, pertama kali Bank akan menggunakan metodologi pendekatan *Basic Indicator* dan saat ini masih melakukan pengumpulan data risiko yang akan digunakan dalam aplikasi metodologi *Advanced Measurement Approach*.

Risiko hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis dalam bisnis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketidakan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhiya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Bank mengelola risiko hukum dengan memastikan seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Bank dengan pihak ketiga didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank dan segi hukum.

Risiko reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank.

Bank mengelola risiko reputasi dengan memastikan kesesuaian antara aktivitas kegiatan usaha Bank bersama-sama dengan aktivitas lain sehingga reputasi Bank tetap terjaga.

Risiko strategis

Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi risiko strategis, yaitu visi Bank, rencana strategis, perubahan kepemilikan dan peluncuran produk baru.

Bank mengebia risiko strategis melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan setiap kebijakan strategis secara kolektif dan komprehensif oleh Direksi dan Komite-komite yang telah dibentuk.

Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Bank mengelola risiko kepatuhan dengan melakukan penelaahan secara komprehensif untuk memastikan kesesuaian kebijakan standar operasi dan prosedur serta pengembangan produk baru dengan peraturan eksternal.

Divisi Kepatuhan dan Sub Divisi Hukum Korporasi juga telah melaksanakan pengkajian sistem dan prosedur terhadap rencana kebijakan dan rancangan keputusan dalam rangka mencegah penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Di samping itu, Bank juga melaksanakan fungsi kepatuhan meliputi tindakan untuk:

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Operational risk

Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate or failure of internal processes, human factors and systems or from external events.

The risk is inherent in all business processes, operational activities, the Bank's systems and products, ranging from the Central Office to the entire office network. Failure to manage operational risk can result in financial losses, the safety of employees and the reputation of the Bank.

*To oversee the operational risks that may occur, the Bank has developed a system using measurement methodology (*self-assessment*) conducted by each risk owner, which enables the Bank to develop a risk mapping system that could potentially be implemented at each work unit.*

*With map of risks, operational risks can be measured (*high, medium, or low*), so that management can exercise control over the impact of risks arising. To allocate the needs of operational risk capital, in accordance with the Basel Committee on Banking Supervision, as well as the roadmap for implementation of Basel II in Indonesia, the first time the Bank will use the methodology *Basic Indicator Approach* and currently still collecting risk data that will be used in the application methodology of the *Advanced Measurement Approach*.*

Legal risk

Legal risk is the risk raised by weakness in judicial aspects of the business, which could be caused by legal claims, non-existence of supported regulation or weaknesses in agreements, such as unfulfilled terms and conditions in contracts and binding collateral which is not complete.

Legal risks are managed by ensuring that all activities and business relationships between the Bank with third parties are based on rules and conditions which able to protecting the Bank's interests from a legal perspective.

Reputation risk

Reputational risk is the risk that is caused by negative publicity related to the business activity of the Bank or negative perception of the Bank.

The Bank manages its reputational risk by ensuring that its business activities are in conformity with its other activities; so as to maintain the Bank's reputation.

Strategic risk

Strategic risk is the risk that is caused by inappropriate determination and implementation of the Bank strategy, inappropriate business decisions or being unresponsive to external changes. Here are the factors that influence the strategic risk that the Bank's vision, strategic plan, changes in ownership and new product launches.

The Bank manages strategic risk through a consideration of, and decision-making process regarding every strategic policy in a collective and comprehensive manner performed by the established Bank's Directors and Committees.

Compliance risk

Compliance risk is the risk caused by non-compliance with or non-application of prevailing regulations.

The Bank manages its compliance risk by performing comprehensive review to ensure that Bank's Standard Operating Procedures and new product development conform with external regulations.

Compliance Division and Corporate Law Sub Division have also evaluated systems and procedures relating to new or revised policies and decisions to ensure their compliance with the applicable regulations. Furthermore, the Bank has also perform compliance function including:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kepatuhan (lanjutan)

- (i) Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- (ii) Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank; tindakan mengelola risiko kepatuhan dilaksanakan dengan mencegah pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- (iii) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (iv) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

37. MANAJEMEN MODAL

Tujuan utama manajemen permodalan Bank adalah untuk memastikan bahwa permodalan telah memenuhi persyaratan permodalan eksternal dan mempertahankan peringkat kredit yang kuat dan rasio permodalan yang sehat dalam rangka menunjang bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Modal yang diwajibkan regulator

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menentukan dan mengawasi kebutuhan modal Bank. Bank diwajibkan untuk mentaati peraturan OJK yang berlaku dalam hal ini modal yang diwajibkan regulator. Pendekatan Bank terhadap pengelolaan modal ditentukan oleh strategi dan persyaratan organisasi bank dengan memperhitungkan peraturan, serta keadaan ekonomi dan komersial.

Bank mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak regulator sepanjang periode pelaporan, khususnya berkenaan dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aktiva Terimbang Menurut Risiko (ATMR).

Bank menghitung kebutuhan modal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27 Tahun 2022 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum" dan Surat Edaran OJK No.43/SEOJK/03/2016 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional", dimana modal yang diwajibkan regulator dianalisa dalam dua tier sebagai berikut:

- Modal inti (tier 1), yang terdiri dari modal inti utama dan modal inti tambahan. Modal inti utama antara lain meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, tambahan modal disetor, cadangan umum, laba tahun-tahun lalu dan periode/tahun berjalan (100%), penghasilan komprehensif lainnya berupa potensi keuntungan/kerugian yang berasal dari perubahan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersebut untuk dijual, selisih kurang dari penyisihan penghapusan aset produktif sesuai ketentuan Bank Indonesia dan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif yang diperbolehkan. Aset pajak langgungan, aset takberwujud (termasuk goodwill) dan penyeraatan (100%) merupakan faktor pengurang modal inti utama. Modal inti tambahan antara lain terdiri dari saham preferen, surat berharga subordinasi dan pinjaman subordinasi dimana ketiganya bersifat non kumulatif setelah dikurangi pembelian kembali.
- Modal pelengkap (tier 2) antara lain meliputi surat berharga subordinasi dan pinjaman subordinasi serta penyisihan penghapusan aset produktif sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

38. RISK MANAGEMENT (continued)

Compliance risk (continued)

- (i) To create compliance culture in all level of organization and Bank's business activities;
- (ii) Manages compliance risk face by the Bank; managing compliance risk is based on Financial Services Authority's regulation about Risk Management for the Bank;
- (iii) Ensure policy, regulation, system and procedure and bank business activities inline with Financial Services Authority's regulation and law; and
- (iv) Ensure bank's compliance with commitments made by the Bank to Financial Services Authority and/or other monitoring authority.

37. CAPITAL MANAGEMENT

The primary objectives of the Bank's capital management are to ensure that it complies with externally imposed capital requirements and it maintains strong credit ratings and healthy capital ratio in order to support its business and to maximize shareholders value.

Regulatory capital

Financial Services Authority (OJK) sets and monitors capital requirements for the Bank. The Bank is required to comply with prevailing OJK regulation in respect of regulatory capital. The Bank's approach to capital management is driven by bank's strategic and organizational requirements taking into account regulatory, economic and commercial environment.

The Bank has complied with all regulatory imposed capital requirements throughout the reporting period, particularly regarding Capital Adequacy Ratio (CAR) and calculation of Risk Weighted Assets (RWA).

Bank calculates its capital requirements in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 27 Year 2022 about Minimum Capital Reserve or Commercial Bank and OJK Circular Letter No.43/SEOJK/03/2016 about "Transparency and Publication Conventional Commercial Bank Report", where the regulatory capital is analysed into two tiers as follows:

- Tier 1 capital, which consists of core and additional core capital. Core capital includes issued and fully paid-up capital, additional paid-in capital, general reserve, specific reserve, retained earnings and profit for the period/year (100%), other comprehensive income deriving from potential gain/loss from the changes in fair value of financial assets classified as available-for-sale, shortfall between allowable amount of allowance for uncollectible account on productive assets according to Bank Indonesia guideline and allowance for impairment losses on productive assets. Deferred tax assets, intangible assets (including goodwill) and share investments (100%) are deducted from core capital. Additional core capital includes non-cumulative preference shares, subordinated securities and subordinated debts net of buyback portion.

- Supplementary capital (tier 2), which includes subordinated securities and subordinated debts and allowance for uncollectible account on productive assets according to Bank Indonesia guideline.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

37. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

Modal yang diwajibkan regulator (lanjutan)

Beberapa batasan berlaku untuk bagian-bagian modal yang diwajibkan oleh regulator, antara lain Bank wajib menyediakan modal inti tier 1 (tier 1) paling rendah sebesar 6% dari ATMR dan modal inti utama (Common Equity tier 1) paling rendah sebesar 4,5% dari ATMR.

- Modal tier 1, meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, cadangan umum, saldo laba dan laba tahun berjalan.
- Modal tier 2, meliputi penyiitan kerugian penurunan nilai yang diperbolehkan.

Bank tidak mempunyai modal tambahan lain yang memenuhi kriteria modal tier 3 sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku.

Berbagai batasan telah diterapkan untuk bagian-bagian modal yang diwajibkan oleh regulator. Pengaruh dari pajak tangguhan telah dikeluarkan dalam menentukan jumlah saldo laba untuk modal tier 1; 100 persen laba periode berjalan sebelum pajak tangguhan dapat diperhitungkan dalam modal tier 1; dan modal tier 2 tidak boleh melebihi modal tier 1. Terdapat juga batasan jumlah penyiitan kerugian kolektif penurunan nilai yang boleh dimasukkan sebagai bagian dari modal tier 2.

Aset Terlimbah Menurut Risiko ("ATMR") Bank ditentukan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan yang mencerminkan berbagai tingkat risiko yang terkait dengan aset dan eksposur, yang tidak tercermati dalam laporan posisi keuangan. Berdasarkan peraturan OJK, Bank diharuskan untuk mempertimbangkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional dalam mengukur ATMR Bank.

Kebijakan Bank adalah menjaga modal yang kuat untuk menjaga kepercayaan pemodal, kreditor dan pasar dan untuk mempertahankan perkembangan bisnis di masa depan. Pengaruh tingkat modal terhadap tingkat pengembalian ke pemegang saham juga diperhitungkan dan Bank juga memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara tingkat pengembalian yang tinggi, yang dimungkinkan dengan gearing yang lebih besar serta kountungan-kountungan dan tingkat keamanan yang didapat dari posisi modal yang kuat.

Manajemen menggunakan rasio permodalan yang diwajibkan regulator untuk memantau permodalan Bank dan rasio-rasio modal ini tetap menjadi standar industri untuk mengukur kecukupan modal. Pendekatan OJK untuk pengukuran ini terutama didasarkan pada pemantauan hubungan antara profil risiko Bank dengan ketersediaan modal. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.

Posisi modal yang diwajibkan regulator Bank sesuai peraturan OJK yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
	(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)		
Modal tier 1			Tier 1 capital
Modal inti utama (CET 1)			Common core capital (CET 1)
Modal saham	2.045.186	1.956.186	Share capital
Modal sumbangan	247	247	Donation capital
Dana setoran modal	12.469	26.600	Additional paid-in capital
Cadangan umum	451.791	423.174	General reserves
Laba tahun berjalan	110.151	228.931	Current year income
Selisih kurang antara penyiitan diwajibkan dan penyiitan kerugian penurunan nilai atas aset produktif	(228.769)	(254.878)	Less difference between the allowance required and allowance for impairment losses on earning assets
Penyiitan penghapusan aset non produktif	(15.641)	(15.641)	Allowance for losses on non-earning assets
Perhitungan pajak tangguhan	(37.635)	(32.980)	Deferred assets calculations
Aset takberwujud	(1.037)	(530)	Intangible assets
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Modal inti tambahan (AT 1)	<hr/>	<hr/>	Additional core capital (AT 1)
	2.336.861	2.331.011	
Modal tier 2			Tier 2 capital
Cadangan umum aset produktif	93.003	87.589	General reserve of earning assets
	<hr/>	<hr/>	
Jumlah modal	2.429.864	2.418.599	Total capital

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

37. MANAJEMEN MODAL (Janjutan)

Modal yang diwajibkan regulator (Janjutan)

	2 0 2 3 (dalam Jutaan Rupiah / in million Rupiah)	2 0 2 2 (dalam Jutaan Rupiah / in million Rupiah)	
Aset Tertimbang Menurut Risiko			<i>Risk Weighted Asset</i>
Risiko kredit	7.440.230	7.007.093	Credit risk
Risiko pasar			Market risk
Risiko operasional	2.146.574	1.986.098	Operational risk
Total Aset Tertimbang Menurut Risiko	<u>9.586.804</u>	<u>8.993.191</u>	<i>Total Risk Weighted Asset</i>
Rasio kecukupan modal			<i>Capital Adequacy Ratio</i>
Rasio CET 1	24,39%	25,92%	CET 1 Ratio
Rasio tier 1	24,39%	25,92%	Tier 1 Ratio
Rasio tier 2	0,97%	0,87%	Tier 2 Ratio
Rasio modal terhadap ATMR	25,35%	26,89%	<i>Ratio of capital to ATMR</i>
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan	10% - <11%	10% - <11%	<i>Required Capital Adequacy Ratio</i>

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 mengenai Kewajiban Modal Minimum Bank Umum, bank wajib menyediakan modal minimum sesuai dengan profil risikonya yang ditetapkan dengan skema berikut ini:

- Untuk profil risiko peringkat 1 (satu), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;
- Untuk profil risiko peringkat 2 (dua), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 9% sampai dengan kurang dari 10% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;
- Untuk profil risiko peringkat 3 (tiga), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 10% sampai dengan kurang dari 11% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;
- Untuk profil risiko peringkat 4 (empat) atau 5 (lima), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 11% sampai dengan kurang dari 14% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko.

Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai suatu bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.

Bank telah menghitung modal minimum sesuai profil risiko untuk posisi 31 Desember 2023 dengan menggunakan peringkat profil risiko posisi September 2023.

Berdasarkan self-assessment Bank, profil risiko Bank dinilai berada pada peringkat 2. Oleh karena itu, Bank berkewajiban untuk memenuhi modal minimum sebesar 10% sampai dengan kurang dari 11%. Pada tanggal 31 Desember 2023, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank berada pada level di atas modal minimum yang diwajibkan tersebut, yaitu sebesar 25,35%.

38. SEGMENT OPERASI

Seperit yang dijelaskan di Catatan 2aa, Bank pada saat ini dikelola sebagai segmen operasi tunggal. Pada saat ini, Bank hanya menganalisa segmen secara geografis dimana manajemen menelaah laporan internal manajemen secara bulanan untuk masing-masing area. Berikut adalah ringkasan yang menjelaskan tiap-tiap area geografis dalam Bank:

- Nusa Tenggara Timur meliputi area Kupang, Maumere, Atambua, Ende, Waingapu, Ruteng, Kefamenanu, SoE, Waikabubak, Lewoleba, Larantuka, Bajawa, Kalabahi, Rote, Betun, Labuan Bajo, Waialabula, Borong, Mbay, Anakalang dan Sabu.
- Selain Nusa Tenggara Timur yaitu area Surabaya.

37. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

Regulatory capital (continued)

	2 0 2 3 (dalam Jutaan Rupiah / in million Rupiah)	2 0 2 2 (dalam Jutaan Rupiah / in million Rupiah)	
Aset Tertimbang Menurut Risiko			<i>Risk Weighted Asset</i>
Risiko kredit	7.440.230	7.007.093	Credit risk
Risiko pasar			Market risk
Risiko operasional	2.146.574	1.986.098	Operational risk
Total Aset Tertimbang Menurut Risiko	<u>9.586.804</u>	<u>8.993.191</u>	<i>Total Risk Weighted Asset</i>
Rasio kecukupan modal			<i>Capital Adequacy Ratio</i>
Rasio CET 1	24,39%	25,92%	CET 1 Ratio
Rasio tier 1	24,39%	25,92%	Tier 1 Ratio
Rasio tier 2	0,97%	0,87%	Tier 2 Ratio
Rasio modal terhadap ATMR	25,35%	26,89%	<i>Ratio of capital to ATMR</i>
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan	10% - <11%	10% - <11%	<i>Required Capital Adequacy Ratio</i>

In accordance with Financial Services Authority regulation No.34/POJK.03/2016 dated September 22, 2016 regarding Minimum Capital Adequacy Requirement for Commercial Banks, a bank is required to provide a minimum capital based on its risk profile as stipulated under the following schemes:

- For banks with risk profile rating 1 (one), the minimum capital requirement is 8% of Risk Weighted Asset;
- For banks with risk profile rating 2 (two), the minimum capital requirement is 9% to less than 10% of Risk Weighted Asset;
- For banks with risk profile rating 3 (three), the minimum capital requirement is 10% to less than 11% of Risk Weighted Asset;
- For banks with risk profile rating 4 (four) or 5 (five), the minimum capital requirement is 11% to less than 14% of Risk Weighted Asset.

Financial Services Authority is authorised to stipulate minimum capital greater than minimum capital in terms of Financial Services Authority assesses a bank as facing potential losses which requires a larger capital.

Bank has calculated minimum capital according to the risk profile of the position in December 31, 2023 using risk profile ranking position in September 2023.

Based on its self-assessment, the Bank risk profile is assessed to be in rating 2. Therefore, the Bank is required to provide a minimum capital of 10% to less than 11%. As of December 31, 2023, the Bank Capital Adequate Ratio was 25,35%, which was higher than the required minimum provision of capital.

38. OPERATION SEGMENTS

As described in Note 2aa, the Bank is currently managed as single operating segment. Currently, the Bank only analyzed geographically segment, where management examines the internal management reports on monthly basis for each area. Here is summary that explains each geographical area in the Bank:

- East Nusa Tenggara covers area of Kupang, Maumere, Alambua, Ende, Waingapu, Ruteng, Kefamenanu, SoE, Waikabubak, Lewoleba, Larantuka, Bajawa, Kalabahi, Rote, Betun, Labuan Bajo, Waialabula, Borong, Mbay, Anakalang and Sabu.
- In addition to East Nusa Tenggara, that is Surabaya area.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

38. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Berdasarkan Surat Persetujuan OJK No. S-2/KO.0802/2023 dan Surat Keputusan Direksi No. 13 tanggal 1 Februari 2023 Bank menutup Kantor Cabang Surabaya.

	2 0 2 3	2 0 2 2	
Jumlah aset			Total assets
Nusa Tenggara Timur	17.325.443.549.863	16.472.922.704.885	East Nusa Tenggara
Selain Nusa Tenggara Timur	-	559.167.267.970	In addition to East Nusa Tenggara
Jumlah	<u>17.325.443.549.863</u>	<u>17.032.119.972.855</u>	Total
Pendapatan operasional			Operating income
Nusa Tenggara Timur	1.716.796.495.162	1.207.270.894.423	East Nusa Tenggara
Selain Nusa Tenggara Timur	-	165.250.768.682	In addition to East Nusa Tenggara
Jumlah	<u>1.716.796.495.162</u>	<u>1.183.521.663.105</u>	Total
Laba operasional			Operating income
Nusa Tenggara Timur	148.988.155.057	330.080.180.343	East Nusa Tenggara
Selain Nusa Tenggara Timur	-	(11.015.776.457)	In addition to East Nusa Tenggara
Jumlah	<u>148.988.155.057</u>	<u>319.064.403.886</u>	Total
Laba sebelum pajak			Income before tax
Nusa Tenggara Timur	148.543.729.545	316.368.594.604	East Nusa Tenggara
Selain Nusa Tenggara Timur	-	(11.015.776.457)	In addition to East Nusa Tenggara
Jumlah	<u>148.543.729.545</u>	<u>305.352.818.147</u>	Total

39. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.15 tahun 2004 tentang pengakhiran tugas dan pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dinyatakan dalam pasal 8 bahwa dengan diakhiri tugas dan dibubarkannya BPPN, Program Penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum yang semula dilakukan oleh BPPN berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.26 tahun 1998 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.27 tahun 1998, selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3) sebagaimana diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No.17 tahun 2004, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan No.84/KMK.06/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.179/KMK.017/2000 tentang Syarat, Tatalaca dan Kelentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Program Penjaminan Pemerintah melalui UP3 telah berakhir pada tanggal 22 September 2005, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.86/PMK.05/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Perhitungan dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Terhadap Pembayaran Bank Umum untuk periode 1 Juli sampai 21 September 2005. Sebagai pengganti UP3, Pemerintah telah membentuk Lembaga Independen yaitu Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), berdasarkan Undang-Undang No.24 tanggal 22 September 2004, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. LPS dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 untuk per nasabah per bank. Simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau dibawah 4,25% pada tanggal 31 Desember 2023 (31 Desember 2022: 3,75%).

Pada tanggal 13 Januari 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Perppu No.3/2008 menjadi Undang-Undang.

38. OPERATION SEGMENTS (continued)

Based on OJK Approval Letter No. S-2/KO.0802/2023 and Directors' Decree No. 13 dated February 1 2023, the Bank closed the Surabaya Branch Office.

39. GOVERNMENT GUARANTEES ON THE OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS

Based on Article 8 of the Decision No.15 year 2004 of the President of the Republic of Indonesia regarding the termination of the role and winding-up of the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA), the Government Guarantee Program on the obligations of domestic banks, which was originally handled by IBRA based on the Decisions of the President of the Republic of Indonesia No.26 year 1998 and No.27 year 1998, shall be handled by the Ministry of Finance, specifically by the Government Guarantee Implementation Unit (Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah/UP3) as provided in the Decision of the President of the Republic of Indonesia No.17 year 2004, which was further regulated by the Decision No.84/KMK.06/2004 dated February 27, 2004 of the Ministry of Finance regarding the Amendment of Decision No.179/KMK.017/2000 of the Ministry of Finance of the Term, Implementing Guidelines and Conditions of the Government Guarantee on the obligations of commercial banks.

The Guarantee Program by the Government through UP3 ended on September 22, 2005, as stated in Regulation No.86/PMK.05/2005 dated August 10, 2005 of the Ministry of Finance concerning the Calculation and Payment of Premium on Guarantee Program from Commercial Banks for the period July 1 to September 31, 2005. To replace UP3, the Government was formed an independent institution there is the Indonesia Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjaminan Simpanan/LPS). Based on Law No.24 dated September 22, 2004, which have been amended Law No.4 Year 2023-dated January 12, 2023 regarding Development and Strengthening of Financial Sector, LPS was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, the amount of such guarantee is subject to change if the situation complies with certain valid criteria.

Based on Government Regulation No.66 year 2008 dated October 13, 2008 regarding the Amount of Deposit Guarantee by the Indonesia Deposit Insurance Corporation, the amount of deposit covered by LPS is up to Rp2,000,000,000 per depositor per bank. Customer deposits are covered only if the rate of interest is equal to or below 4.25% as of December 31, 2023 (December 31, 2022: 3.75%).

On January 13, 2009, the Government of the Republic of Indonesia has enacted Government Regulation In Lieu of Law No.3/2008 to the Law.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

40. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN

- a. Pada tanggal 12 April 2021, Bank telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Taspen (Persero) tentang penyelenggaraan produk asuransi kumpulan Taspen Save, untuk jaminan han tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui rekening bank. Perjanjian ini bertujuan sejak ditandatangani sampai dengan salah satu pihak mengakhiri Perjanjian ini.
- b. Pada tanggal 18 Januari 2021 Bank telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Sarana Pacindo tentang sewa menyewa mesin EDC beserta Aplikasi yang terinstal untuk kemudian ditempatkan di seluruh Kantor Cabang dan Capem. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan para pihak.
- c. Pada tanggal 18 Januari 2021 Bank telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Insan Teknologi Sermesta tentang sewa menyewa 78 (tujuh puluh delapan) unit mesin ATM beserta Aplikasi yang terinstal untuk kemudian ditempatkan di seluruh Kantor Cabang dan Capem. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan para pihak.
- d. Pada tanggal 17 Juli 2020, Bank telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Asuransi Bangun Askinda tentang Sistem Host to Host Data Asuransi. Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerja sama ini dan berakhir pada saat bersamaan dengan berakhirnya perjanjian kerja sama asuransi.
- e. Pada tanggal 17 Juli 2020, Bank telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Perjamin Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Sistem Host to Host Data Penjaminan. Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerja sama ini.
- f. Pada tanggal 20 Maret 2020, Bank telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) tentang Tabungan Pesiar Insurance. Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerja sama ini.
- g. Pada tanggal 17 Mei 2018, Bank telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur tentang Pembayaran Gaji (Payroll) Pegawai Lingkup Kabupaten Sumba Timur. Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini.
- h. Pada tanggal 17 Mei 2017, Bank telah menandatangani Addendum II Perjanjian Kerjasama dengan PT Asuransi Kredit Indonesia tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Addendum II perjanjian tersebut berlaku mulai 1 Januari 2017.
- i. Pada tanggal 30 Desember 2013, Bank telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional antara Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pusat Pembelaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembelaan Perumahan (FLPP) Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera, yang merupakan indeks dari Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No.14/sk.9/tk.02.04/12/2013 dan No.55/BNTT/XII/2013 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembelaan Perumahan (FLPP) Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembelaan Pemilikan Rumah Sejahtera.

40. SIGNIFICANT AGREEMENTS

- a. On April 12, 2021, the Bank has signed a Cooperation Agreement with PT Taspen (Persero) regarding the implementation of the Taspen Save collection of insurance products, for old age insurance, pensions, work accident insurance and death insurance through bank accounts. This Agreement is valid from the time it is signed until either party terminates this Agreement.
- b. On January 18, 2021, the Bank has signed a Cooperation Agreement with PT Sarana Pacindo regarding the rental of EDC machines along with Installed Applications, to be placed in all Sub-branch and Branch Offices. This agreement is valid for a period of 5 (five) years and can be extended again upon the agreement of the parties.
- c. On January 18, 2021, the Bank has signed a Cooperation Agreement with PT Insan Teknologi Sermesta regarding the rental of 78 (seventy eight) ATM machines along with installed applications that will be placed in all Sub-branch and Branch Offices. This agreement is valid for a period of 5 (five) years and can be extended again upon the agreement of the parties.
- d. On July 17, 2020, the Bank has signed Cooperation Agreement with PT Asuransi Bangun Askinda on Host to Host Insurance Data System. This agreement is valid for 5 years from the date of signing of this cooperation agreement and ends at the same time as the termination of the insurance cooperation agreement.
- e. On July 17, 2020, the Bank has signed Cooperation Agreement with PT Perjamin Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur on Utilization of Information Technology on the Host to Host Data Guarantee System. This agreement is valid for 5 years from the date of signing of this cooperation agreement.
- f. On March 20, 2020, the Bank has signed Cooperation Agreement with PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) on Pesiar Insurance Savings. This agreement is valid for 5 years from the date of signing of this cooperation agreement.
- g. On May 17, 2018, the Bank has signed Cooperation Agreement with Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia on Guarantee for People's Business Loans (KUR). Percentage of collateral coverage is 70% from total loss of the Bank. This agreement is valid for 3 years starting from January 1, 2018 until January 1, 2021 and may be renewed upon the agreement of the parties.
- h. On April 20, 2018, the Bank has signed Cooperation Agreement with the Government of East Sumba Regency on Payroll of East Sumba Regency Scope Officers. This agreement is valid for 5 years from the date of signing of this cooperation agreement.
- i. On May 17, 2017, the Bank has signed Addendum II of Cooperation Agreement with PT Asuransi Kredit Indonesia concerning Credit Guarantee for People's Business (KUR) of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Addendum II of the agreement starting from 1 January 2017.
- j. On December 30, 2013, the Bank has signed Agreement on Operational Cooperation between Unit Public Service Board Center for Housing Ministry of Public Housing of the Republic of Indonesia on Disbursement Housing Finance Liquidity Facility (FLPP) in Order Procurement of Housing Through the Welfare Housing Loan, which is a follow-on agreement between the Ministry of Public Housing of the Republic of Indonesia with PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No.14/sk.9/tk.02.04/12/2013 and No.55/BNTT/XII/2013 on the distribution of the Housing Financing Fund Liquidity Facility (FLPP) in Order Procurement Through Housing Loans/Financing of Welfare Housing.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

40. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

- j. Pada tanggal 19 April 2013, Bank telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Asuransi Jasasahaja Putera tentang Kerjasama Penutupan Asuransi Umum, Surety Bond, Penerbitan Jaminan Back to Back dan Asuransi Terhadap Agunan Nasabah PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal dilandalangkan sampai dengan dikehendaki oleh salah satu pihak untuk diakhiri.

40. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

- j. On April 19, 2013, the Bank has signed Cooperation Agreement with PT Asuransi Jasasahaja Putera regarding General Insurance Closing Cooperation, Surety Bond, Publishing Back to Back Guarantee and Insurance Against the Customer Collateral PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. This agreement is valid from the date signed until desired by either party to end.

41. MASALAH HUKUM

Bank menghadapi beberapa permasalahan hukum yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan posisi keuangan, terdapat permasalahan hukum yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan. Namun demikian, manajemen Bank yakin bahwa hasil keputusan masalah atau tuntutan hukum tersebut tidak akan membawa dampak yang signifikan pada hasil usaha, posisi keuangan atau likuiditas Bank.

41. LEGAL ISSUES

The Bank faces several legal issues related to the Bank's business activities. As of the completion date of the statement of financial position, there are legal issues that are still in the process of being resolved in court. However, the Bank's management believes that the outcome of the dispute resolution or lawsuit will not have a significant impact on the results of operations, financial position or liquidity of the Bank.

42. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) YANG DIKELUARKAN DAN DIREVISI

Berikut ini ikhtisar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan untuk Bank, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023:

Berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025:

- PSAK 74, "Kontrak Asuransi", yang diadopsi dari IFRS 17, penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 71 dan PSAK 72.

Saat ini Bank sedang mengevaluasi dan belum menetapkan dampak dari penerapan standar akuntansi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Bank.

42. STATEMENT OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAK) WHICH ISSUED AND REVISED

The following summarizes the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) which were issued by the Financial Accounting Standards Board and are relevant to the Bank, but is not yet effective for financial statements ended December 31, 2023:

Effective on or after January 1, 2025:

- PSAK 74, "Insurance Contracts", adopted from IFRS 17, early application is permitted for entities that have also applied PSAK 71 and PSAK 72.

The Bank is currently evaluating the above standards and has not yet determined the impact of these accounting standard on the financial statement of the Bank.



**PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH (JAMKRIDA)
NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)**

LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

	HALAMAN
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	1
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	II - IV
NERACA	1
LAPORAN LABA RUGI	2
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	3
LAPORAN ARUS KAS	4
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	5 - 28

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ibrahim Imang
Alamat Kantor : Jl. R. Suprapto No. 15 RT 005/002 Kel. Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Tinggal : Jl. Kecubung RT 019 RW 007 Kel. Naikolan Kec. Maulafa, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Octaviana Ferdiana Mae
Alamat Kantor : Jl. R. Suprapto No. 15 RT 005/002 Kel. Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Tinggal : Kota Kupang RT 004 RW 002 Kel. Oepura Kec. Maulafa, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jabatan : Direktur Operasional

Untuk dan atas nama PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (PT Jamkrida NTT) menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Jamkrida NTT.
2. Laporan keuangan PT Jamkrida NTT tanggal 31 Desember 2023 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh PT Jamkrida NTT sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern perusahaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta dalam rangka memenuhi prinsip tata kelola PT Jamkrida NTT yang baik.

Kupang, 02 Februari 2024

PT JAMKRIDA NTT



Ibrahim Imang
Direktur Utama

Octaviana Ferdiana Mae
Direktur Operasional



KANTOR AKUNTAN PUBLIK RONI P UPUNG

IZIN USAHA : KMK RI NO. 1258/KM.1/2021

Assurance Service, Non Assurance Services, Tax Consulting, Management Consulting

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00005/2.1353/AU.1/09/1632-1/1/II/2024

Kepada yang terhormat.

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Penjaminan Kredit Daerah NTT

di-

Kupang, NTT

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Penjaminan Kredit Daerah NTT terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2023, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, laporan neraca PT Penjaminan Kredit Daerah NTT 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami.

Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Kewajiban Imbalan Pasca Kerja berjumlah kurang dari ketentuan yang berlaku.

Perusahaan telah menghitung dan mengestimasi dengan berbasis perhitungan yang dilakukan oleh konsultan aktuaris dengan menggunakan asumsi-asumsi aktuaris yang diperkenankan dan memenuhi standar serta mencadangkan kewajiban imbalan pasca kerja karyawan untuk melaksanakan dan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan No. 24 (PSAK-24), namun jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK RONI PUPUNG

IZIN USAHA : KMK RI NO. 1258/KM.1/2021

Assurance Service, Non Assurance Services, Tax Consulting, Management Consulting

Respon kami atas Hal Audit Utama

- Kami memahami dan mengevaluasi terhadap proses perhitungan imbalan pasca kerja yang dilakukan secara bertahap dalam upaya untuk menerapkan PSAK-24 secara penuh.
- Perusahaan telah mengikutsertakan pengurus dan karyawannya dalam program dana pensiun imbalan atau manfaat pasti diluar BPJS Ketenagakerjaan.
- Kami meyakini bahwa perusahaan mampu membayar kewajiban imbalan pasca kerja yang akan jatuh tempo dan Dewan Direksi berkomitmen untuk tahun yang akan datang akan mencadangkan kewajiban imbalan pasca kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengacu pada asumsi aktuaria, meliputi asumsi tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, dan tingkat mortalita.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistik selain melaksanakannya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisme profesional selama audit. kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK RONI PUPUNG

IZIN USAHA : KMK RI NO. 1258/KM.1/2021

Assurance Service, Non Assurance Services, Tax Consulting, Management Consulting

- Menyimpulkan ketepatan pengguna basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi-transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengkomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami dan jika relevan, pengamanan terkait.

Dari Hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama dalam laporan audit kami, kecuali peraturan perundang-undangan pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan hal tersebut akan diekpektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan atas komunikasi tersebut.

Hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 8 Februari 2023 dengan nomor opini 00006/2.0119/AU-1/09/0165-1/1/II/2023.

Kantor Akuntan Publik
Roni Pupung



Ade Suryana, CPA
NRAP AP.1632



00005

Jakarta, 02 Februari 2024

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	catafan	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2f,4	10.064.525.008	11.240.861.051
Investasi Lancar	2g,5	107.600.000.000	92.263.384.819
Plutang Penjaminan Ulang	2h,6	19.868.153.558	19.169.024.858
Biaya Dibayar Dimuka	7	861.201.079	987.701.387
Sewa Dibayar Dimuka	8	127.572.300	176.941.275
Jumlah Aset Lancar		<u>138.521.451.945</u>	<u>123.837.913.390</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Investasi Tidak Lancar	2g,5	27.353.585.000	32.353.585.000
Biaya Dibayar Dimuka	7	58.708.045.681	42.179.887.243
Aset Tetap <i>(setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.2.239.194.649,- dan 2022 sebesar Rp.1.650.648.480,-)</i>	2i,9	15.846.134.487	1.315.081.083
Aset Tidak Lancar Lain-lain	2j,10	1.427.234.927	16.781.357.091
Aset Pajak Tangguhan	10	376.143.228	376.143.228
Dana Imbal Pasca Kerja	11	1.674.985.175	-
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>105.386.128.498</u>	<u>93.006.053.645</u>
JUMLAH ASET		<u>243.907.580.443</u>	<u>216.843.967.035</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang IJP Yang Ditangguhkan	12	4.325.286.135	3.632.224.626
Utang Pajak	13	1.574.190.764	691.306.189
Cadangan Klaim	2q,14	2.617.586.202	1.703.568.873
Pendapatan Diterima Dimuka	15	5.926.270.958	(9.760.860)
Utang Lain-lain	16	2.295.938.191	854.011.965
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>16.739.272.250</u>	<u>6.871.350.793</u>
Liabilitas Jangka Panjang			
Pendapatan Diterima Dimuka	15	68.969.458.056	47.213.836.923
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	2k,11	1.741.693.348	501.524.304
Utang Lain-Lain	16	-	9.822.759.916
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>70.711.151.404</u>	<u>57.538.121.143</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>87.450.423.655</u>	<u>64.409.471.936</u>
EKUITAS			
Modal Ditempatkan dan Disetor	1g, 17,LPE	125.250.000.000	125.250.000.000
Uang Muka Setoran Modal		4.000.000.000	4.000.000.000
Cadangan	1g, 18,LPE	13.589.724.427	10.391.467.536
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	LR,LPE	13.617.432.361	12.793.027.563
JUMLAH EKUITAS		<u>156.457.156.788</u>	<u>152.434.495.099</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>243.907.580.443</u>	<u>216.843.967.035</u>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	cataatan	2023	2022
PENDAPATAN PENJAMINAN			
Pendapatan IJP	2i,19	25.267.466.670	14.966.875.185
Beban Klaim	2i,20	8.843.605.191	(1.342.018.753)
JUMLAH		16.423.861.479	16.308.893.938
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan Investasi	2i,21	3.875.754.876	4.813.112.265
Pendapatan Operasional Lainnya	2i,22	8.593.129.215	5.011.373.006
JUMLAH		12.468.884.091	9.824.485.271
LABA BRUTO		28.892.745.570	26.133.379.209
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Gaji dan Pegawai	2i, 23	9.916.231.941	9.066.857.468
Beban Depresiasi	2i, 24	588.546.169	427.257.100
Beban Amortisasi	2i, 25	89.450.004	80.450.004
Beban Umum dan Administrasi	2i, 26	3.064.862.720	3.201.712.615
JUMLAH		13.659.090.834	12.776.277.187
LABA OPERASIONAL		15.233.654.736	13.357.102.022
PENDAPATAN LAIN-LAIN			
Pendapatan Bunga	2i, 27	96.947.572	126.925.889
Pendapatan Lain-Lain	2i, 28	1.385.542.602	1.789.314.159
JUMLAH		1.482.490.274	1.916.240.048
BEBAN LAIN-LAIN			
Beban Lain-Lain	2i, 29	249.981.986	109.840.676
JUMLAH		249.981.986	109.840.676
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		16.466.163.024	15.163.501.394
Beban Pajak Penghasilan Kini	2n,13	2.848.730.663	2.370.473.831
Manfaat Pajak Tangguhan	2n,13	-	-
LABA BERSIH SETELAH PAJAK		13.617.432.361	12.793.027.563
Pendapatan Komprehensif Lainnya		-	-
LABA KOMPREHENSIF		13.617.432.361	12.793.027.563

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Uang Muka Setoran Modal	Cadangan	Saldo Laba / (Rugi)	Jumlah Ekuitas
Saldo Per 31 Desember 2021	125.250.000.000	-	7.388.199.739	12.013.071.187	114.401.617.492
Uang Muka Setoran Modal	1g,16	- 4.000.000.000	-	-	4.000.000.000
Dividen		-	-	(6.006.535.593)	(6.006.535.593)
Cadangan Umum	1g,17	-	3.003.267.796	(3.003.267.796)	-
Cadangan Tujuan	1g,17	-	-	-	-
Dana Representatif		-	-	(300.326.779)	(300.326.779)
Tantiem		-	-	(1.201.307.120)	(1.201.307.120)
CSR		-	-	(300.326.779)	(300.326.779)
Jasa Produksi		-	-	(600.653.559)	(600.653.559)
Dana Kesejahteraan Karyawan		-	-	(600.653.559)	(600.653.559)
Laba Bersih Tahun Berjalan	LR	-	-	12.793.027.563	12.793.027.563
Saldo Per 31 Desember 2022	125.250.000.000	4.000.000.000	10.391.467.535	12.793.027.564	152.434.495.099
Setoran Modal	1g,16	-	-	-	-
Dividen		-	-	(6.396.513.782)	(6.396.513.782)
Cadangan Umum	1g,17	-	3.198.256.891	(3.198.256.891)	(0)
Cadangan Tujuan	1g,17	-	-	-	-
Dana Representatif		-	-	(319.825.688)	(319.825.688)
Tantiem		-	-	(1.279.302.756)	(1.279.302.756)
CSR		-	-	(319.825.688)	(319.825.688)
Jasa Produksi		-	-	(639.651.378)	(639.651.378)
Dana Kesejahteraan Karyawan		-	-	(639.651.378)	(639.651.378)
Laba Bersih Tahun Berjalan		-	-	13.617.432.361	13.617.432.361
Saldo Per 31 Desember 2023	125.250.000.000	4.000.000.000	13.589.724.426	13.617.432.362	156.457.156.788

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Imbal Jasa Penjaminan (IJP)	72.744.087.105	44.180.469.617
Penerimaan dari Aktivitas Operasi Lainnya	1.618.718.625	4.086.719.084
Pembayaran IJP Co-Guarantee/JPU/Premi Asuransi	(14.860.245.974)	(7.731.181.849)
Pembayaran Klaim Kepada Terjamin	(29.968.992.898)	(19.183.821.435)
Pembayaran Biaya-Biaya	(52.183.513.090)	(35.826.629.694)
Kas Bersih Dari (Untuk) Aktivitas Operasi	(22.649.946.232)	(14.474.444.277)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Hasil Investasi	3.920.835.838	4.813.112.265
Penempatan Investasi Yang Diperkenankan	248.793.292.023	228.821.173.877
Pembayaran Aktivitas Investasi Lainnya	(224.844.003.890)	(216.104.399.022)
Kas Bersih Dari (Untuk) Aktivitas Investasi	27.870.123.971	17.529.887.120
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari Setoran Modal	-	4.000.000.000
Pembayaran Dividen	(6.396.513.782)	(6.006.535.593)
Kas Bersih Dari (Untuk) Aktivitas Pendanaan	(6.396.513.782)	(2.006.535.593)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(1.176.336.043)	1.048.907.250
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun	11.240.861.051	10.191.953.801
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun	10.064.525.008	11.240.861.051
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun Terdiri Dari :		
Kas	46.703.940	71.802.364
Giro	4.263.080.439	2.744.135.141
Tabungan	5.754.740.629	8.424.923.546
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun	10.064.525.008	11.240.861.051

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERO DA)

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perseroan

PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (selanjutnya disebut "Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 52 tanggal 24 September 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, SH., Notaris di Kupang dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-33170.04.10.2014 tertanggal 6 November 2014, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur. Perusahaan telah mengalami beberapa perubahan anggaran dasar, dengan perubahan terakhir pada tanggal 23 Maret 2023 dengan akta nomor 28 dihadapan Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn.

b. Ruang Lingkup

Maksud dan tujuan dari pendirian perusahaan adalah Perusahaan Penjaminan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang Lembaga Penjaminan sesuai dengan nomor induk berusaha 1297000521386 tanggal 18 Mei 2021 sebagai berikut:

- Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga penjaminan meliputi perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan ulang. Perusahaan penjaminan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pemberian penjaminan atas pemenuhan kewajiban financial Penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Perusahaan penjaminan ulang adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pemberian penjaminan atas pemenuhan kewajiban financial Perusahaan Penjaminan yang telah menjamin pemenuhan kewajiban financial Penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Contoh perusahaan penjaminan adalah PT Penjaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) , PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat (PT Jamkrida Jabar).

c. Susunan Pengurus

Sesuai Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 25 Mei 2019 dan 26 April 2022, susunan pengurus perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama	:	Johanes Agustinus Mboeik
Komisaris	:	Laki Isak Victor Riwu Kaho
Direktur Utama	:	Ibrahim Imang
Direktur	:	Octaviana Ferdiana Mae

d. Perizinan

1. Akta Pendirian Nomor 120 tanggal 30 April 2016 yang dibuat dihadapan notaris Roberto Valentino Mambaitfeto, SH., MH.
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-33170.40.10.2014, tahun 2014 tertanggal 6 November 2014, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
3. NIB Nomor 1297000521386 tanggal 18 Mei 2021 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor: 71.132.088.7-922.000 tanggal 16 Juni 2015.
5. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-144/D.05/2014 tentang Pemberian Ijin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur.

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)

Catatan atas Laporan Keuangan - Lanjutan

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

e. Tempat dan Kedudukan Perusahaan

PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) berkedudukan di Ruko Friendship Blok A2-A4, Jalan Soeharto, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur.

f. Jumlah Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia perusahaan per tanggal 31 Desember 2023 adalah 34 orang dengan rincian sebagai berikut:

Dewan Komisaris	: 2 (Dua) Orang
Direksi	: 2 (Dua) Orang
Karyawan	: 27 (Dua Puluh Tujuh) Orang
Karyawan Kontrak (KKWT)	: 3 (Tiga) Orang

g. Modal

Modal dasar saham entitas sebesar Rp 500.000.000.000,- terdiri dari sejumlah 500.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- per lembar saham. Dari modal dasar tersebut ditempatkan dan disetorkan 25,05% atau sebesar Rp 125.250.000.000,-. Berikut komposisi para pemegang saham:

Keterangan	% Kepemilikan	Jumlah Saham	Jumlah Modal Saham
Modal Dasar		500.000	500.000.000.000
Nominal Per Lembar Saham			1.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	25,00%	125.000	125.000.000.000
2. GKPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur	0,05%	250	250.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	25,05%	125.250	125.250.000.000
Jumlah Modal Yang Belum Disetorkan :			
1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	74,80%	374.002	374.002.000.000
2. GKPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur	0,15%	748	748.000.000
Jumlah Modal Yang Belum Disetorkan	75%	374.750	374.750.000.000
Uang Muka Setoran Modal			4.000.000.000

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur adalah Badan Usaha Perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang Penjaminan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM). PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur sudah menyusun *Standard Operating Procedure (SOP)* untuk bagian Accounting sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur secara rinci sebagai berikut:

a. Pernyataan Ketaatan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK).

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)

Catatan atas Laporan Keuangan - Lanjutan

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

b. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan *accrual basis* dengan menggunakan konsep nilai perolehan, kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur dengan dasar sebagaimana dijelaskan di dalam kebijakan akuntansi terkait. Pendapatan imbal jasa penjaminan dicatat secara *accrual* mulai tahun buku 2015. Seluruh biaya diakui sebagai beban pada saat perusahaan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dan disajikan berdasarkan kas dan setara kas. Laporan keuangan dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain, yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

c. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen Perusahaan untuk menggunakan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi, jumlah aset dan liabilitas serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjenji pada laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula. Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan, revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

d. Kebijakan Akuntansi yang Berlaku Efektif 1 Januari 2020

Berikut ini adalah standar, perubahan dan interpretasi yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2020 dan mempunyai pengaruh terhadap Perseroan:

- PSAK No.1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- PSAK No.2 "Laporan Arus Kas";
- PSAK No.7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi";
- PSAK No.8 "Peristiwa Setelah Periode Pelaporan";
- PSAK No.16 "Aset Tak Berwujud";
- PSAK No.19 "Aset Tak Berwujud";
- PSAK No.24 "Imbalan Paska Kerja";
- PSAK No.50 "Penyajian Instrumen Keuangan"
- PSAK No.55 "Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan";
- PSAK No.60 "Pengungkapan Instrumen Keuangan";
- PSAK No.72 "Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan"

e. Instrumen Keuangan

Instrumen Keuangan (*financial instruments*) adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan (*financing assets*) entitas dan liabilitas keuangan (*financing liability*) atau instrumen ekuitas (*equity instruments*) entitas lain. Aset keuangan meliputi setiap aset yang menimbulkan hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya. Liabilitas keuangan meliputi setiap kewajiban kontrak untuk membayar kas atau aset keuangan. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)

Catatan atas Laporan Keuangan - *Lanjutan*

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (*Lanjutan*)

f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, tabungan, giro dan deposito bank yang jatuh tempo nya 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan yang tidak digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya, dan dibatasi pencairannya.

g. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

1. Aset Keuangan

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas, bank, surat-surat berharga, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, dan aset lain-lain. Perusahaan menerapkan PSAK No. 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No. 50 "Instrumen Keuangan: Penyajian, efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, yang mengantikan PSAK No. 55 (Revisi 2011) dan PSAK No. 50 (Revisi 2010)". Dampak penyesuaian atas penerapan awal PSAK No. 50 dan PSAK No. 55:

a). Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi; dan investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Pendapatan bunga dari investasi dimiliki hingga jatuh tempo dicatat dalam laporan laba rugi dan diakui sebagai pendapatan bunga. Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat investasi dan investasi diakui didalam laporan keuangan sebagai "Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

b). Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual

Kategori untuk diperdagangkan adalah aset dan kewajiban keuangan yang diperoleh atau dimiliki Perusahaan terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau position taking. Aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan kewajiban keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan, dan kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari item moneter, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai. Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)

Catatan atas Laporan Keuangan - *Lanjutan*

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (*Lanjutan*)

g. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan - *Lanjutan*

1. Aset Keuangan - *Lanjutan*

c). Penurunan Nilai Aset

PSAK No. 48 "Penurunan Nilai Aset", mengharuskan nilai aset dikaji ulang atas kemungkinan penurunan pada nilai wajarnya yang disebabkan oleh peristiwa atau perubahan keadaan yang menyebabkan nilai tercatat aset mungkin tidak dapat dipulihkan. Nilai residu aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh entitas saat ini atau merupakan taksiran nilai atau potensi arus kas masuk apabila aset tersebut dijual pada saat penarikan/penghentian (*retirement*) aset. Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan di review, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif. Kebijakan akuntansi atas penurunan nilai aset keuangan adalah sebagai berikut:

- Penurunan nilai aset keuangan yang dinilai secara individual termasuk pengungkapan kelompok aset keuangan yang evaluasi penurunan nilainya dihitung dengan menggunakan *individual assessment*.
- Penurunan nilai aset keuangan yang dinilai secara objektif termasuk pengungkapan kelompok aset keuangan yang evaluasi penurunan nilainya dilakukan secara kolektif dengan menggunakan *collective assessment*.

2. Liabilitas Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan dikeluarkan ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Seluruh liabilitas keuangan termasuk kategori biaya perolehan diamortisasi. Pada saat pengakuan awal liabilitas keuangan kategori biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

3. Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset telah ditransfer (jika, secara substansial seluruh resiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Perusahaan melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kontrol yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakumannya ketika kewajiban telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

4. Klarifikasi dan Instrumen Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan memperlimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut.

5. Saling Hapus Aset Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan, jika entitas memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)

Catatan atas Laporan Keuangan - *Lanjutan*

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (*Lanjutan*)

g. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan - *Lanjutan*

5. Saling Hapus Aset Keuangan - *Lanjutan*

(i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

(ii) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

h. Piutang Penjaminan Ulang (Co-Guarantee)

Pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggung jawab mitra co-guarantee dicatat sebagai Piutang dalam Penyelesaian. Pengakuan Piutang dalam Penyelesaian dilakukan setiap terjadi pembayaran klaim yang menjadi tanggungan mitra co-guarantee . Piutang dalam Penyelesaian diakui sebagai Piutang co-guarantee tatkala mitra co-guarantee mengaksep piutang dalam penyelesaian tersebut (sesuai dengan jangka waktu dalam Perjanjian Kerja Sama antara PT. Jamkrida NTT dengan mitra co-guarantee), namun pembayaran belum dilakukan. Piutang Usaha disajikan sebesar nilai bersihnya setelah dikurangi dengan Cadangan Piutang tak Tertagih, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan penelaahan terhadap keadaan tiap-tiap piutang pada akhir tahun.

i. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada). Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi rutin yang signifikan dilakukan, yang merupakan suatu kondisi untuk menentukan kelangsungan operasional suatu jenis aset tetap, biaya atas masing-masing inspeksi signifikan tersebut diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus, berdasarkan taksiran masa manfaat laporan, sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap:	Masa manfaat	Percentase
Gedung	20 Tahun	5%
Kendaraan	5 Tahun	20%
Inventaris	5 Tahun	20%

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)

Catatan atas Laporan Keuangan - *Lanjutan*

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (*Lanjutan*)

i. Aset Tetap - *Lanjutan*

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuan pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukan dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuan. Biaya pinjaman, termasuk rugi selisih kurs, yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan.

Pengakuan beban penyusutan dihitung sejak tanggal perolehan aset tetap tersebut dengan ketentuan, jika perolehan sebelum atau pada tanggal 15, beban penyusutan diakui 1 bulan pada bulan perolehan. Namun jika perolehan setelah tanggal 15, beban penyusutan diakui pada bulan berikutnya. Untuk perolehan aset tetap baru, kapitalisasinya ditentukan berdasarkan daftar aset yang dapat dikapitalisasi yang ditetapkan dengan SK Direksi tersendiri. Biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat transaksi pembelian aset tetap dapat dikapitalisasi dan menambah harga perolehan aset sepanjang biaya tersebut relevan dan terkait langsung dengan aset tetap yang bersangkutan dengan jumlah maksimal 20% dari harga perolehan aset yang bersangkutan.

Pengeluaran pemeliharaan dan perbaikan aset tetap yang dapat dikapitalisasi ditentukan oleh tingkat materialitas. Ketentuan batas minimal pengeluaran yang dapat dikapitalisasi sebagai berikut :

- Inventaris : Rp. 5.000.000,-
- Kendaraan : Rp. 10.000.000,-

j. Aset Lain-lain

1. *Standard Operating Procedure (SOP)*

Standar Operating Procedure (SOP) merupakan aset yang diperoleh pada tahun 2015. Biaya ini diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya yaitu 5 tahun.

2. Fasilitas Uang Panjar Pegawai (UPP)

Merupakan aset diluar SOP dengan kriteria aset ini dapat memberikan manfaat ekonomis masa datang, dan dapat memberikan kesempatan bagi karyawan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Aset ini dibentuk atas persetujuan Surat Keputusan Direksi PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 068/SK-Dir/X/2016 tentang Pemberian Fasilitas Uang Panjar Pegawai (UPP) PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur. Syarat dan ketentuan khusus diatur lebih lanjut dalam surat keputusan ini.

k. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Perseroan belum membuat Estimasi manfaat karyawan dengan asumsi aktuaria sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja No.13/2003 dan UU No. 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta PSAK 24. Namun telah melaksanakan kewajiban pembayaran pesangon sesuai UU No. 13/2007 tentang Ketenagakerjaan.

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)

Catatan atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (*Lanjutan*)

L. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dicatat dan diakui atas dasar akrual (*accrual basis*) dengan metode output PSAK No. 72 "Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan", kecuali untuk imbal hasil atas penempatan dana dicatat dan diakui atas dasar kas (*cash basis*). Beban diakui sesuai dengan masa manfaatnya. Pada tahun yang bersangkutan (*accrual basis*) pengajuan klaim dianggap sebagai beban klaim setelah komite klaim menyetujui untuk melakukan pembayaran dan setelah diterbitkannya surat persetujuan klaim kepada pihak penerima jaminan.

m. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam Rupiah untuk mencerminkan nilai kurs rata-rata antara kurs jual dan kurs beli yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada hari terakhir transaksi perbankan pada tahun tersebut. Laba atau rugi selisih kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

n. Pajak Penghasilan

Perusahaan menetapkan beban pajak kini berdasarkan taksiran beban pajak tahun berjalan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer pada setiap tanggal laporan antara aset dan kewajiban untuk tujuan komersial aset dan kewajiban untuk tujuan perpajakan. Manfaat pajak masa yang akan datang seperti rugi pajak yang dapat dikompensasi, juga diakui apabila besar kemungkinan manfaat tersebut dapat terealisasi.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal neraca. Perubahan nilai tercatat aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada operasi tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Perubahan atas kewajiban perpajakan dicatat ketika ketetapan pajak diterima atau jika keberatan, diajukan oleh Perusahaan, ketika hasil dari keberatan tersebut telah ditentukan.

o. Imbal Jasa Penjaminan, Fee Based Income Bank Pelaksana, dan Beban Co-Guarantee

Pendapatan imbal jasa penjaminan, fee based income bank pelaksana dan beban co-guarantee diakui pada saat Sertifikat Penjaminan diterbitkan. Pendapatan imbal jasa penjaminan, fee based income bank pelaksana dan beban co-guarantee diakui selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP). Batas waktu maksimal pengakuan imbal jasa penjaminan, fee based income bank pelaksana dan beban co-guarantee adalah sesuai dengan jangka waktu penjaminan. Pendapatan imbal jasa penjaminan disajikan secara bruto. Imbal jasa penjaminan yang sudah diterima namun belum diakui sebagai pendapatan disajikan sebagai IJP/IJK ditangguhkan. Fee based income bank pelaksana dan beban co-guarantee yang sudah dibayarkan namun belum dibebankan langsung.

p. Utang Klaim

Hutang klaim merupakan hutang perusahaan kepada Bank pemberi pinjaman yang dijamin oleh perusahaan. Hutang klaim adalah hutang yang telah diproses dan disetujui namun belum dibayar. Hutang klaim dinyatakan sebesar prosentase penjaminan atas baki debet pinjaman yang macet.

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)

Catatan atas Laporan Keuangan - Lanjutan

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (*Lanjutan*)

q. Cadangan Klaim

Cadangan klaim ditetapkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan. Berdasarkan ketentuan tersebut cadangan klaim yang wajib dibentuk minimal sebesar 0,01% dari total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri atau penjumlahan dari 100% (seratus per seratus) dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri pada saat klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*incurred but not reported*).

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang diterapkan PSAK No. 55 (Revisi 2006) dipenuhi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki resiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan dibawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Imbalan Kerja Karyawan

Penentuan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dan beban imbalan kerja karyawan.

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)

Catatan atas Laporan Keuangan - *Lanjutan*
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (*Lanjutan*)

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 3 sampai 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Instrumen Keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan pengguna estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metedologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sejauh kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Aset Pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia hingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan.

Penyisihan Penurunan Nilai Pasar dan Keusangan Persediaan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)

Catatan atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN SETARA KAS

	2023	2022
Kas		
Kas	46.703.940	71.802.364
Jumlah	46.703.940	71.802.364
Giro		
Giro PT Bank Mandiri - 1610010002801	49.725.127	7.805.009
Giro PT Bank NTT - 1013697872/01601080000135	4.095.676.854	2.708.073.670
Giro PT Bank Bukopin - 1001180165	3.649.569	21.393.396
Giro PT Bank BRI - 3901002670307	1.884.225	3.062.608
Giro PT Bank Artha Graha - 1077613176	2.402.717	2.762.717
Giro PT Bank CIMB Niaga - 800169657300	109.741.947	1.037.741
Jumlah	4.263.080.439	2.744.135.141
Tabungan		
Tabungan Koperasi NTT Sejahtera	8.039.353	8.039.353
Tabungan PT BPR Tanaoba Lais Manekat - 0021004553/0012046243	35.807.641	54.177.992
Tabungan PT BPR Central Pitoby - 00120100694/1352000705	82.162.589	6.353.160
Tabungan PT BPR Tanjung Pratama - 0010026690	70.295.333	104.530.498
Tabungan PT BPR Danamas Belu - 0010000926	1.376.088	1.335.340
Tabungan PT BPR NAM - 0100006715	124.733.158	10.476.599
Tabungan PT BPR Bina Usaha Dana - 001.201.002297	329.465.613	544.006.226
Tabungan PT Bank NTT	5.102.860.854	7.696.004.378
Jumlah	5.754.740.629	8.424.923.546
JUMLAH KAS DAN SETARA KAS	10.064.525.008	11.240.861.051

- Tingkat suku bunga giro per 31 Desember 2023 rata-rata 1% per tahun.
- Tingkat suku bunga tabungan per 31 Desember 2023 rata-rata 2,5% per tahun.

5. PENEMPATAN INVESTASI

	2023	2022
INVESTASI LANCAR		
Deposito		
Deposito PT Bank NTT	88.000.000.000	76.500.000.000
Deposito PT Bank Bukopin	4.100.000.000	3.000.000.000
Deposito PT BPR Tanaoba Lais Manekat	8.000.000.000	6.000.000.000
Deposito PT BPR Central Pitoby	1.500.000.000	1.500.000.000
Deposito PT BPR NAM	500.000.000	500.000.000
Deposito PT BRI	-	-
Deposito PT BPR Sari Dinar Kencana	2.500.000.000	2.500.000.000
Deposito PT BPR Bina Usaha Dana	3.000.000.000	2.263.384.819
Jumlah Investasi Lancar	107.600.000.000	92.263.384.819

- Tingkat suku bunga deposito per 31 Desember 2023 rata-rata 5% sampai dengan 7% per tahun.
- Tingkat suku bunga reksadana per 31 Desember 2023 sebesar 9% per tahun.

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)

Catatan atas Laporan Keuangan - Lanjutan
 Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PENEMPATAN INVESTASI - Lanjutan

	2023	2022
INVESTASI TIDAK LANCAR		
SBNFR56	5.553.585.000	-
Reksadana-Danareksa	-	10.553.585.000
Reksadana Pendapatan Tetap-Indonesia Sehat I	5.000.000.000	-
Reksadana Terproteksi Danareksa Proteksi 59	16.800.000.000	21.800.000.000
Jumlah Investasi Tidak Lancar	27.353.585.000	32.353.585.000
JUMLAH PENEMPATAN INVESTASI	134.953.585.000	124.616.969.819

Tingkat persentase Investasi Lancar dan Tidak Lancar yang ditempatkan dalam instrumen SBN dibandingkan dengan total keseluruhan nilai investasi adalah sebesar 26%. Persentase tersebut sudah sesuai ketentuan minimal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 Tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang mengatur bahwa nilai investasi pada instrumen Surat Berharga Negara untuk perusahaan penjaminan adalah paling rendah sebesar 20% dari seluruh jumlah investasi.

6. PIUTANG PENJAMINAN ULANG

	2023	2022
Plutang Reasuransi AJB Bumiputera	5.782.286.320	6.044.620.186
Plutang Reasuransi PT. Ass. Jasindo	63.421.665	63.421.665
Plutang Reasuransi PT. Igna Asia	2.405.807.220	4.881.763.980
Plutang Reasuransi PT. Paragon	11.716.478.321	8.179.219.027
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(99.839.968)	-
JUMLAH PIUTANG PENJAMINAN ULANG	19.868.153.558	19.169.024.858

- Piutang Reasuransi PT. Igna Asia rata-rata realisasi penerimaan piutang adalah 30 hari sejak piutang ditagihkan, PT. Ass Jasindo dan AJB Bumiputera 300 hari sejak piutang ditagihkan.

7. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	2023	2022
Biaya Dibayar Dimuka Lancar		
BDD - Reasuransi PT. Paragon	764.506.354	987.701.387
BDD - Uang Muka Pekerjaan	96.694.725	-
Jumlah	861.201.079	987.701.387
Biaya Dibayar Dimuka Tidak Lancar		
BDD - Reasuransi AJB Bumiputera	669.351.986	757.748.470
BDD - Reasuransi PT. Asuransi Jasa Indonesia	15.780.860	17.856.965
BDD - Reasuransi PT. Igna Asia	12.667.931.383	15.505.234.771
BDD - Reasuransi PT. Paragon	45.354.981.453	25.899.047.037
Jumlah	58.708.045.681	42.179.887.243
JUMLAH BIAYA DIBAYAR DIMUKA	59.569.246.760	43.167.588.630

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)

Catatan atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. SEWA DIBAYAR DIMUKA

	2023	2022
Sewa Tanah Kantor	127.572.300	176.941.275
JUMLAH SEWA DIBAYAR DIMUKA	127.572.300	176.941.275

9. ASET TETAP

TAHUN 2023	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir	
	1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023
Harga Perolehan				
Gedung Kantor	-	13.986.635.873	-	13.986.635.873
Kendaraan	2.095.015.000	-	-	2.095.015.000
Inventaris Kantor	870.714.563	1.132.963.700	-	2.003.678.263
Jumlah	2.965.729.563	15.119.599.573	-	18.085.329.136
Akumulasi Penyusutan				
Gedung Kantor	-	104.899.770	-	104.899.770
Kendaraan	1.137.059.750	240.365.250	-	1.377.425.000
Inventaris Kantor	513.588.730	243.281.149	-	756.869.879
Jumlah	1.650.648.480	588.546.169	-	2.239.194.649
Nilai Buku	1.315.081.083			15.846.134.487

Terdapat penambahan Inventaris Kantor pada tahun 2023 sebesar Rp.15.119.599.573,- yang terdiri dari:

- Pembelian 9 (Sembilan) unit Partisi bulan Januari sampai Maret tahun 2023 sebesar Rp.321.351.100,-
- Pembelian 1 (Satu) unit Meja Biro bulan Januari tahun 2023 sebesar Rp.10.778.000,-
- Pembelian 3 (Tiga) unit Pot Bunga bulan Januari tahun 2023 sebesar Rp. 3.375.000,-
- Pembelian 26 (Dua Puluh Enam) unit Meja Biro bulan Februari tahun 2023 sebesar Rp.47.500.000,-
- Pembelian 4 (Empat) unit Kursi Kerja bulan Februari tahun 2023 sebesar Rp. 5.900.000,-
- Pembelian 125 (Seratus Dua Puluh Lima) unit Kursi Tamu bulan Februari tahun 2023 sebesar Rp. 104.000.000,-
- Pembelian 3 (Tiga) Set Kursi Sofa+Meja bulan Februari tahun 2023 sebesar Rp.21.600.000,-
- Pembelian 10 (Sepuluh) unit Sofa bulan Februari tahun 2023 sebesar Rp. 21.000.000,-
- Pembelian 3 (Tiga) Lembar Hiasan Dinding bulan Februari tahun 2023 sebesar Rp.1.368.000,-
- Pembelian 2 (Dua) unit Air Mancur Mini bulan Maret tahun 2023 sebesar Rp.3.600.000,-
- Pembelian 1 (Satu) Lemari pendingin bulan Maret tahun 2023 sebesar Rp.8.895.000,-
- Pembelian 1 (Satu) unit Mesin Absensi bulan Maret tahun 2023 sebesar Rp.675.000,-
- Pembelian 3 (Tiga) unit Hardisk External bulan Maret tahun 2023 sebesar Rp.10.000.000,-
- Pembelian 8 (Delapan) unit Acces Point Wifi bulan Maret tahun 2023 sebesar Rp. 26.000.000,-
- Pembelian 12 (Dua Belas) unit Switch HUB bulan Maret tahun 2023 sebesar Rp.3.650.000,-
- Pembelian 1 (Satu) unit Komputer pada bulan Maret tahun 2023 sebesar Rp.141.750.000,-
- Pembelian 3 (Tiga) unit UPS pada bulan Maret tahun 2023 sebesar Rp. 20.150.000,-
- Pembelian 2 (Dua) unit WEBCAM bulan Maret tahun 2023 sebesar Rp. 3.170.000,-
- Pembelian 10 (Sepuluh) unit Rak Filing bulan Maret 2023 sebesar Rp.39.400.000,-
- Pembelian 1 (Satu) unit Tiang Bendera bulan Maret tahun 2023 sebesar Rp. 1.920.000,-
- Pembelian 2 (Dua) unit Railing Tangga bulan Maret tahun 2023 sebesar Rp. 2.970.000,-
- Pembelian 2 (Dua) unit Troli Dorong bulan Maret tahun 2023 sebesar Rp. 5.710.000,-
- Pembelian 7 (Tujuh) unit Partisi bulan April sampai Juni tahun 2023 sebesar Rp.17.950.000,-

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)

Catatan atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP - Lanjutan

- Pembelian 2 (Dua) unit Meja Biro bulan Juni tahun 2023 sebesar Rp.3.700.000,-
- Pembelian 30 (Tiga Puluh) unit Kursi Kerja bulan Mei tahun 2023 sebesar Rp. 44.250.000,-
- Pembelian 2 (Dua) Set Kursi Sofa+Meja bulan Mei tahun 2023 sebesar Rp. 12.500.000,-
- Pembelian 10 (Sepuluh) unit Komputer pada bulan Mei sampai Juni tahun 2023 sebesar Rp.58.400.000,-
- Pembelian 3 (Tiga) unit Lemari Arsip pada bulan April dan Juni tahun 2023 sebesar Rp. 4.200.000,-
- Pembelian 1(Satu) unit Filing Cabinet unit bulan Juni 2023 sebesar Rp.2.350.000,-
- Pembelian 1 (Satu) unit Infocus bulan Juni tahun2023 sebesar RP. 6.700.000,-
- Pembelian 3 (Tiga) unit Tea Table bulan April tahun 2023 sebesar Rp. 7.000.000,-
- Pembelian 3 (Dua) unit Sound Sistem (Mic) bulan Mei tahun 2023 sebesar Rp. 9.000.000,-
- Pembelian 1 (Satu) unit Kursi Sofa+Meja bulan Juli tahun 2023 sebesar Rp.6.250.000,-
- Pembelian 1 (Satu) unit Meja Biro bulan Juni tahun 2023 sebesar Rp.2.750.000,-
- Pembelian 1 (Satu) unit Partisi bulan Agustus tahun 2023 sebesar Rp. 75.000.000,-
- Pembelian 2 (Dua) unit UPS bulan September tahun 2023 sebesar Rp.5.000.000,-
- Pembelian 1 (Satu) unit Mesin Scanner pada bulan September tahun 2023 sebesar Rp.5.800.000,-
- Pembelian 2 (Dua) unit Rack Arsip pada bulan September tahun 2023 sebesar Rp. 2.998.000,-
- Pembelian 1 (Satu) unit Handphone bulan September 2023 sebesar Rp.30.298.000,-
- Pengakuan 1 (Satu) unit Gedung Kantor PT. Jamkrida NTT bulan Oktober 2023 sebesar Rp.13.986.835.873,-
- Pembelian 1 (Satu) unit Partisi/Sekat Ruangan bulan Oktober 2023 sebesar Rp.9.500.000,-
- Pembelian 2 (Dua) unit Pohon Natal Oktober dan Desember 2023 sebesar Rp.14.878.600,-
- Pembelian 1 (Satu) unit Bunga Hias Plastik bulan November 2023 sebesar Rp. 3.577.000,-
- Pembelian 1 (Satu) unit Hard disk External bulan Desember 2023 sebesar Rp.3.100.000,-

TAHUN 2022	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2022
	1 Januari 2022	Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Kendaraan	2.095.015.000	-	-	2.095.015.000
Inventaris Kantor	782.455.763	88.258.800	-	870.714.563
Jumlah	2.877.470.763	88.258.800	-	2.965.729.563
Akumulasi Penyusutan				
Kendaraan	805.490.750	331.569.000	-	1.137.059.750
Inventaris Kantor	417.900.630	95.688.100	-	513.588.730
Jumlah	1.223.391.380	427.257.100	-	1.650.648.480
Nilai Buku	1.654.079.383			1.315.081.083

10. ASET TIDAK LANCAR LAIN-LAIN	2023	2022
SOP dan Aplikasi Penjaminan	248.204.153	292.654.157
Fasilitas UPP	1.179.030.774	1.488.702.934
Aset Pajak Tangguhan	376.143.228	376.143.228
Bangunan Dalam Proses	-	15.000.000.000
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR LAIN-LAIN	1.803.378.155	17.157.500.319

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)

Catatan atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TIDAK LANCAR LAIN-LAIN - Lanjutan

SOP dan Aplikasi Penjaminan 2023	Saldo Awal 1 Januari 2023	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2023
Harga Perolehan				
SOP	66.500.000	-	-	66.500.000
Aplikasi Penjaminan	506.250.000	45.000.000	-	551.250.000
Jumlah	572.750.000	45.000.000	-	617.750.000
Akumulasi Amortisasi				
SOP	66.500.000	-	-	66.500.000
Aplikasi Penjaminan	213.595.843	89.450.004	-	303.045.847
Jumlah	280.095.843	89.450.004	-	369.545.847
Nilai Buku	292.654.157			248.204.153

Terdapat pengembangan Aplikasi Penjaminan pada Aset Tidak Lancar lain-lain (Aplikasi Penjaminan) sebesar Rp.45.000.000,- pada tahun 2023.

SOP dan Aplikasi Penjaminan 2022	Saldo Awal 1 Januari 2022	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2022
Harga Perolehan				
SOP	66.500.000	-	-	66.500.000
Aplikasi Penjaminan	451.250.000	55.000.000	-	506.250.000
Jumlah	517.750.000	55.000.000	-	572.750.000
Akumulasi Amortisasi				
SOP	66.500.000	-	-	66.500.000
Aplikasi Penjaminan	133.145.839	80.450.004	-	213.595.843
Jumlah	199.645.839	80.450.004	-	280.095.843
Nilai Buku	318.104.161			292.654.157

Fasilitas UPP 2023	Saldo Awal 1 Januari 2023	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2023
Quirinus Mario Kleden	171.841.163	-	119.776.663	52.064.500
Johanis E. De Fretes	360.971.405	-	96.851.785	264.119.620
Ferdinand Lerrick	318.257.261	-	87.684.881	230.572.380
Nicky Laurens	353.619.180	-	97.427.647	256.191.533
Joice E. Marthinus	353.619.180	-	97.427.647	256.191.533
Fransiskus XK. Roman	106.085.753	-	29.228.294	76.857.459
Stanislaus Y. Kapitan	38.186.924	-	26.617.036	11.569.888
Aser Eliut Missa	30.335.643	-	25.871.052	4.464.591
Carolina E. Kape	56.170.896	-	29.171.626	26.999.270
Saldo Fasilitas UPP	1.789.087.405	-	610.056.631	1.179.030.774

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)

Catatan atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TIDAK LANCAR LAIN-LAIN - Lanjutan

Fasilitas UPP 2022	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir	
	1 Januari 2022	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2022
Quirinus Mario Kleden	229.091.048	-	57.249.885	171.841.163
Johanis E. De Fretes	407.191.571	-	46.220.166	360.971.405
Ferdinand Lerrick	360.168.176	-	41.910.915	318.257.261
Nicky Laurens	400.186.865	-	46.567.685	353.619.180
Joice E. Marthinus	400.186.865	-	46.567.685	353.619.180
Fransiskus XK. Roman	120.056.058	-	13.970.305	106.085.753
Stanislaus Y. Kapitan	50.909.122	-	12.722.198	38.186.924
Aser Eliut Missa	42.701.269	-	12.365.626	30.335.643
Carolina E. Kape	70.114.115	-	13.943.219	56.170.896
Saldo Fasilitas UPP	2.080.605.089	-	291.517.684	1.789.087.405

Fasilitas Uang Panjar Pegawai merupakan aset diluar SOP dengan kriteria aset ini dapat memberikan manfaat ekonomis masa datang, dan dapat memberikan kesempatan bagi karyawan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Aset ini dibentuk atas persetujuan Surat Keputusan Direksi PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 068/SK-Dir/X/2016 tentang Pemberian Fasilitas Uang Panjar Pegawai (UPP) PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur.

11. IMBAL PASCA KERJA

2023

2022

a. Dana Imbal Pasca Kerja

Dana Imbal Pasca Kerja - Pegawai DPLK BNI	424.215.234	-
Dana Imbal Pasca Kerja - BPJS TK	1.250.769.941	-
Jumlah Dana Imbal Pasca Kerja	1.674.985.175	-

b. Kewajiban Imbal Pasca Kerja

Kewajiban Imbal Pasca Kerja - Pengurus	66.708.174	501.524.304
Kewajiban Imbal Pasca Kerja - Pegawai DPLK BNI	424.215.233	-
Kewajiban Imbal Pasca Kerja - BPJS TK	1.250.769.941	-
Jumlah Kewajiban Imbal Pasca Kerja	1.741.693.348	501.524.304

JUMLAH IMBAL PASCA KERJA

(66.708.173)

(501.524.304)

Imbal Pasca Kerja adalah Imbalan yang akan diterima baik oleh Pengurus maupun Karyawan setelah melewati masa kerja/pensiun sesuai ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2022, Manajemen telah menunjuk Kantor Konsultan Aktuaria Seta Widodo dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Perhitungan Imbalan Kerja Tahun 2022	1.405.042.226
Estimasi Perhitungan Imbalan Kerja Tahun 2023	1.605.379.031

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)

Catatan atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. UTANG IJP YANG DITANGGUHKAN

	2023	2022
IJP Yang Ditangguhkan Mitra Bank NTT	3.544.541.779	2.857.224.740
IJP Yang Ditangguhkan Mitra BPR Central Pitoby	17.321.145	20.991.145
IJP Yang Ditangguhkan Koperasi Mitra NTT Sejahtera	13.580.000	-
IJP Yang Ditangguhkan Mitra BPR TLM	-	24.953.809
IJP Yang Ditangguhkan Mitra BPR Danamas	2.298.249	2.298.249
IJP Yang Ditangguhkan Mitra BPR NAM	76.310.301	21.883.698
IJP Yang Ditangguhkan Mitra BPR Bina Usaha Dana	203.018.438	268.823.198
IJP Yang Ditangguhkan Mitra Surety Bond	122.066.050	88.821.800
IJP Yang Ditangguhkan Mitra Koperasi Marieta	3.293.420	3.155.880
IJP Yang Ditangguhkan Mitra PT BPR Timor Raya Makmur	126.856.753	128.072.107
IJP Yang Ditangguhkan Mitra Koperasi Suka Damai	216.000.000	216.000.000
JUMLAH UTANG IJP YANG DITANGGUHKAN	4.325.286.135	3.632.224.626

Utang Imbal Jasa Penjaminan Yang Ditangguhkan merupakan penerimaan IJP yang belum dilengkapi dokumen syarat-syarat penjaminan oleh pihak terjamin namun hasil penerimaan IJP telah diterima oleh PT Jamkrida NTT dalam bulan yang bersangkutan.

13. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

	2023	2022
Utang PPh Pasal 21	348.143.461	-
Utang PPh Pasal 23	28.317.462	-
Utang PPh Pasal 25	150.559.041	-
Utang PPh Pasal 29	1.042.022.171	691.306.189
Utang PPN	5.148.629	-
JUMLAH UTANG PAJAK	1.574.190.764	691.306.189

b. Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan

	2023	2022
Beban Pajak Penghasilan Kini	2.848.730.663	2.370.473.831
JUMLAH BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	2.848.730.663	2.370.473.831

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komersial dengan laba fiskal adalah sebagai berikut:

Laba sebelum Pajak Penghasilan

16.466.163.024

15.163.501.394

Koreksi Fiskal Positif (Negatif):

Pendapatan Investasi	(3.875.754.876)	(4.813.112.265)
Beban PPh 21	1.230.189.886	1.193.460.300
Beban Pajak Lain-Lain	108.228.073	187.286.731
Kekurangan Pajak PPh Tahun 2018	-	131.919.091
Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Tabungan	(96.947.672)	(126.925.889)
Jumlah	(2.634.284.589)	(3.427.372.032)

Laba Fiskal

13.831.878.435

11.736.129.362

Laba Fiskal Dibulatkan

13.831.878.000

11.736.129.000

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)

Catatan atas Laporan Keuangan - *Lanjutan*
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PERPAJAKAN - *Lanjutan*

Perhitungan beban pajak, utang pajak, dan pajak dibayar dimuka adalah sebagai berikut :

	2023	2022
PPh fasilitas:		
= (Rp. 4.800.000.000,-/Rp. 37.590.785.520,-) x Rp. 13.831.878.000,-	194.282.497	211.474.549
= (Rp. 1.766.204.520,-) x 11%		
= Rp. 194.282.497,-		
PPh non fasilitas:		
= (Rp. 13.831.878.000,-) - (Rp. 1.766.204.520,-)	2.654.448.166	2.158.999.282
= (Rp. 12.065.673.480,-) x 22%		
= Rp. 2.654.448.166,-		
Jumlah Pajak Penghasilan	2.848.730.663	2.370.473.831
Dikurangi Pajak Penghasilan dibayar di muka :		
PPh Pasal 25	1.806.708.492	1.679.167.642
Estimasi Kurang (Lebih) Bayar Pajak Penghasilan	1.042.022.171	1.679.167.642

14. CADANGAN KLAIM

	2023	2022
Cadangan Klaim	2.617.586.202	1.703.568.873
JUMLAH CADANGAN KLAIM	2.617.586.202	1.703.568.873

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan Vide Pasal 22 Ayat (1) menyatakan Lembaga Penjamin wajib membentuk cadangan klaim paling sedikit 0,01% dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri; atau penjumlahan dari 100% dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri pada saat klaim dilaporkan, dengan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*Incurred but not reported*), mana yang lebih banyak. klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan sebagaimana dimaksud adalah perhitungan atas rata-rata klaim ditanggung sendiri yang telah dibayarkan pada 3 bulan terakhir.

15. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

	2023	2022
Pendapatan Diterima Dimuka - Jangka Pendek		
Produk Penjaminan Kredit Non Produktif	5.926.270.958	(9.760.860)
Jumlah	5.926.270.958	(9.760.860)
Pendapatan Diterima Dimuka - Jangka Panjang		
Produk Penjaminan Kredit Produktif	68.969.458.056	47.213.836.923
Produk Penjaminan Kredit Non Produktif	68.969.458.056	47.213.836.923
Jumlah		
JUMLAH PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	74.895.729.014	47.204.076.063

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)

Catatan atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA - Lanjutan

Pendapatan diterima dimuka merupakan bagian penerimaan IJP kegiatan usaha penjaminan yang belum merupakan hak pendapatan PT. Jamkrida NTT dan masih merupakan beban/kewajiban kepada mitra sampai dengan jatuh tempo haknya berlaku.

16. UTANG LAIN-LAIN

a. Utang Lain-Lain Jangka Pendek

	2023	2022
Cash Collateral	1.662.406.882	854.011.965
Cadangan Investasi	305.265.359	-
Cadangan Bonus Triwulan IV 2023	325.387.000	-
Utang Gaji	2.878.950	-
JUMLAH UTANG LAIN-LAIN JANGKA PENDEK	2.295.938.191	854.011.965

b. Utang Lain-Lain Jangka Panjang

Gedung Kantor PT Jamkrida NTT Dalam Proses	-	9.822.759.916
JUMLAH UTANG LAIN-LAIN JANGKA PANJANG	-	9.822.759.916

17. MODAL DAN UANG MUKA SETORAN MODAL

	2023	2022
Modal Ditempatkan dan Disetor	125.250.000.000	125.250.000.000
Uang Muka Setoran Modal	4.000.000.000	4.000.000.000
JUMLAH MODAL DAN UANG MUKA SETORAN MODAL	129.250.000.000	129.250.000.000

Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 28 tanggal 23 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn., modal dasar PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur adalah sebesar Rp. 500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah). Adapun Setoran Modal terakhir sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dianggap masih sebagai uang muka setoran modal karena belum mendapatkan persetujuan OJK. Berikut Komposisi Pemegang Saham Per 31 Desember 2023:

Nama Pemegang Saham	Percentase Kepemilikan (%)	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Kepemilikan (Rp)
Modal Dasar Saham			
Pemerintah Provinsi NTT	99,8%	499.002	499.002.000.000
GKPRI Provinsi NTT	0,20%	998	998.000.000
Jumlah Modal Dasar Saham	100,00%	500.000	500.000.000.000
Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemerintah Provinsi NTT	25,00%	125.000	125.000.000.000
GKPRI Provinsi NTT	0,05%	250	250.000.000
Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	25,05%	125.250	125.250.000.000
Jumlah Saham Yang Belum Disetorkan Tunai			
Pemerintah Provinsi NTT	74,60%	374.002	374.002.000.000
GKPRI Provinsi NTT	0,15%	748	748.000.000
Saham Yang Belum Disetorkan Tunai	74,95%	374.750	374.750.000.000

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERO DA)

Cataatan atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. MODAL DAN UANG MUKA SETORAN MODAL - Lanjutan

Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 37 tanggal 26 April 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn., modal dasar PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur adalah sebesar Rp. 500.000.000.000,- (Lima Ratus Milyar Rupiah). Adapun Setoran Modal terakhir sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) oleh Pemerintah Provinsi Daerah Nusa Tenggara Timur dianggap masih sebagai uang muka setoran modal karena belum mendapatkan persetujuan OJK. Berikut Komposisi Pernegang Saham Per 31 Desember 2022:

Nama Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Kepemilikan (Rp)
Modal Dasar Saham			
Pemerintah Provinsi NTT	99,8%	499.002	499.002.000.000
GKPRI Provinsi NTT	0,20%	998	998.000.000
Jumlah Modal Dasar Saham	100,00%	500.000	500.000.000.000
Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemerintah Provinsi NTT	25,00%	125.000	125.000.000.000
GKPRI Provinsi NTT	0,05%	250	250.000.000
Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	25,05%	125.250	125.250.000.000
Jumlah Saham Yang Belum Disetorkan Tunai			
Pemerintah Provinsi NTT	74,80%	374.002	374.002.000.000
GKPRI Provinsi NTT	0,15%	748	748.000.000
Saham Yang Belum Disetorkan Tunai	74,95%	374.750	374.750.000.000

18. CADANGAN

	2023	2022
Cadangan Umum	12.310.265.243	9.112.008.352
Cadangan Tujuan	1.279.459.184	1.279.459.184
JUMLAH CADANGAN	13.589.724.427	10.391.467.536

19. PENDAPATAN IMBAL JASA PENJAMINAN (IJP)

	2023	2022
Pendapatan IJP Bruto - Penjaminan Kredit	37.590.785.015	22.862.782.579
Pendapatan IJP Bruto - Surety Bond	2.979.909.263	1.371.612.280
Pendapatan IJP Bruto - Kontra Bank Garansi	1.059.620.783	5.087.836.264
Beban IJP Co-Guarantee/IJPU/Premi Reasuransi	(10.732.260.133)	(10.757.496.653)
Pendapatan Komisi Penjaminan	2.027.794.731	1.250.591.710
Beban Komisi Penjaminan - Mitra	(3.274.205.178)	(2.053.415.917)
Beban Komisi Penjaminan - Agen	(4.384.177.811)	(2.775.035.078)
JUMLAH PENDAPATAN IMBAL JASA PENJAMINAN (IJP)	25.267.466.670	14.966.875.185

Pendapatan IJP Bruto merupakan seluruh komponen pendapatan IJP Bruto (sebelum dipotong fee /komisi untuk mitra) atas penjaminan kredit cash loan dan non cash loan yang diakui dengan menggunakan metode Accrual Basis sesuai jangka waktu penjaminan.

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)

Catatan atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PENDAPATAN IMBAL JASA PENJAMINAN (IJP) - Lanjutan

Beban IJP Co-Guarantee/IJPU/Premi Reasuransi merupakan beban yang harus dikeluarkan dari komponen pendapatan IJP Bruto dalam rangka sharing risk penjaminan, adapun rincian beban dimaksud adalah premi reasuransi yang dibayarkan kepada mitra, diakui dengan menggunakan metode *accrual basis*.

Beban komisi penjaminan bersih merupakan beban yang harus dikeluarkan dari komponen pendapatan IJP Bruto.

20. BEBAN KLAIM

	2023	2022
Beban Klaim Bruto	22.998.024.429	19.183.821.435
Pendapatan Klaim Co-Guarantee/Penjaminan Ulang/Reasuransi	(15.068.436.567)	(14.004.263.740)
Kenaikan / (Penurunan) Cadangan Klaim	914.017.329	(6.521.576.448)
JUMLAH BEBAN KLAIM	8.843.605.191	(1.342.018.753)

Beban klaim bruto merupakan beban klaim yang diajukan oleh mitra penerima jaminan yang disebabkan karena terjamin wanprestasi dalam melakukan kewajibannya.

Klaim Co-Guarantee/Penjaminan Ulang/Reasuransi merupakan beban klaim yang menjadi bagian tanggungan dari mitra reasuransi, beban klaim reasuransi diakui dengan menggunakan metode *cash basis*.

Kenaikan / (Penurunan) cadangan klaim merupakan beban cadangan klaim yang wajib dibentuk sebagai cadangan risiko gagal bayar terjamin, penurunan/kenaikan cadangan klaim merupakan selisih antara cadangan klaim periode berjalan dengan periode sebelumnya.

21. PENDAPATAN INVESTASI

	2023	2022
Deposito		
Pen. Bunga Deposito Bank Mandiri	31.128.986	26.467.508
Pen. Bunga Deposito Bank NTT	2.525.740.577	2.648.166.664
Pen. Bunga Deposito Bank Bukopin	107.547.938	91.979.447
Pen. Bunga Deposito BPR Tanaoba Lais Manekat	251.441.089	242.926.032
Pen. Bunga Deposito BPR Central Pitob	72.000.003	73.241.100
Pen. Bunga Deposito BPR NAM	17.000.001	17.000.000
Pen. Bunga Deposito Bank BRI	-	10.939.755
Pen. Bunga Deposito BPR Sari Dinar Kencana	113.838.793	75.014.915
Pen. Bunga Deposito BPR Bina Usaha Dana	116.131.140	263.384.819
Jumlah	3.234.828.527	3.449.120.240
Obligasi		
Pendapatan Surat Berharga Danareksa-Reksadana-Lancar	-	79.950.000
Pendapatan Investasi Obligasi SBN	159.051.349	605.910.314
Pendapatan Surat Berharga Danareksa-Reksadana	481.875.000	678.131.711
Jumlah	640.926.349	1.363.992.025
JUMLAH PENDAPATAN INVESTASI	3.875.754.876	4.813.112.265

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)

Catatan atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

	2023	2022
Pendapatan Biaya Admin Fasilitas UPP	40.409.616	49.697.304
Pendapatan Admin Penjaminan Kredit (Biaya Akuisisi)	8.490.617.599	4.394.702.351
Pendapatan Kelebihan IJP Mitra	-	566.973.351
Pendapatan Admin Surety Bond dan Kontra Bank Garansi	62.102.000	-
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	8.593.129.215	5.011.373.006

POL Pendapatan Admin Penjaminan Kredit (Biaya Akuisisi) merupakan pendapatan operasional lainnya yang bersumber dari penerimaan IJP Bruto *Cash Basis*, kebijakan pengakuan pendapatan ini merujuk pada POJK Nomor 2/POJK.05/2017 vide Pasal 20 ayat 1 dan 2 yang antara lain mengatur tentang Biaya Akuisisi dapat diberikan sepanjang yang berhubungan dengan perolehan bisnis dan maksimal biaya akuisisi yang dapat diakui adalah sebesar 20% dari nilai IJP. Manajemen mengambil kebijakan untuk mengakui komposisi biaya akuisisi dimaksud sebagai pendapatan, dengan ketentuan untuk mitra yang dibebankan beban komisi sebesar 7,5% dan pengakuan pendapatan biaya akuisisi adalah sebesar 12,5%.

POL Pendapatan Kelebihan IJP Mitra adalah pendapatan dari IJP yang telah disetorkan mitra dan telah terpenuhi syarat untuk dijaminkan, namun IJP yang disetorkan tersebut lebih. Jika dikemudian hari terdapat complain dari mitra dengan melampirkan daftar nominatif yang sesuai dengan besaran setoran IJP atau kelebihan IJP dimintakan kembali, maka akan diakui sebagai beban.

23. BEBAN GAJI DAN PEGAWAI

	2023	2022
Beban Honorarium Komisaris	725.172.000	725.172.000
Beban Gaji Pokok	2.306.808.226	2.201.372.998
Beban Tunjangan Jabatan	210.000.000	210.000.000
Beban Tunjangan Keluarga	139.425.029	135.276.965
Beban Tunjangan Perumahan	219.600.000	219.600.000
Beban Tunjangan Komunikasi	75.000.000	75.000.000
Beban Tunjangan Transportasi	168.400.000	157.200.000
Beban Tunjangan Konsumsi	170.200.000	162.300.000
Beban Bonus	976.161.000	1.257.367.184
Beban Tunjangan Hari Raya	659.450.000	649.046.000
Beban Tunjangan Cuti	279.527.276	414.154.000
Beban Pemeliharaan Kesehatan	16.176.200	28.336.723
Beban BPJS Kesehatan	161.370.543	117.734.225
Beban Imbal Pasca Kerja - BPJS Ketenagakerjaan	251.792.253	286.157.704
Beban Imbal Pasca Kerja - Cadangan Penghargaan Pengurus	1.982.266.102	1.152.286.456
Beban Tunjangan Pensiun	87.261.954	82.392.913
Beban Pajak PPh 21	1.230.189.886	1.193.460.300
Beban Honorarium Tenaga Outsourcing	257.431.472	-
JUMLAH BEBAN GAJI DAN PEGAWAI	9.916.231.941	9.066.857.468

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)

Catatan atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. BEBAN DEPRESIASI	2023	2022
Beban Depresiasi Gedung	104.899.770	
Beban Depresiasi Inventaris	243.281.149	95.688.100
Beban Depresiasi Kendaraan	240.365.250	331.569.000
JUMLAH BEBAN DEPRESIASI	588.546.169	427.257.100
25. BEBAN AMORTISASI	2023	2022
Beban Amortisasi Aplikasi Penjaminan	89.450.004	80.450.004
JUMLAH BEBAN AMORTISASI	89.450.004	80.450.004
26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	2023	2022
Beban Pendidikan dan Pelatihan	90.601.300	264.973.712
Beban Bea Materai	4.377.000	2.097.000
Beban Pajak Lain-Lain	108.228.073	187.286.731
Beban Bahan Bakar Kendaraan Dinas	68.481.129	57.480.083
Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas	25.081.618	22.584.356
Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	37.978.113	13.589.440
Beban Listrik, Air dan Telepon	198.170.892	82.370.802
Beban Alat Tulis Kantor	84.826.699	50.344.942
Beban Kebutuhan Kantor	92.501.261	42.910.059
Beban Perjalanan Dinas	561.913.158	431.395.094
Beban Pengembangan TI	1.886.150	70.542.588
Beban Operasional Lainnya	16.354.922	547.803.567
Beban Sewa	143.810.250	70.631.025
Beban Promosi	741.688.050	932.057.368
Beban Umum dan Administrasi Lainnya	888.964.105	425.645.848
JUMLAH BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	3.064.862.720	3.201.712.615
27. PENDAPATAN BUNGA	2023	2022
Pendapatan Jasa Giro	32.964.423	48.145.602
Pendapatan Bunga Tabungan	63.983.249	78.780.287
JUMLAH PENDAPATAN BUNGA	96.947.672	126.925.889
28. PENDAPATAN LAIN-LAIN	2023	2022
Pendapatan Hasil Penagihan Subrogasi	1.355.884.759	1.757.664.159
Pendapatan Lain-Lain	29.657.843	31.650.000
JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN	1.385.542.602	1.789.314.159

Pendapatan Hasil Subrogasi merupakan pendapatan atas penerimaan angsuran terjamin macet (yang telah dibayarkan klaimnya kepada penerima jaminan) dan penerimaan klaim dari mitra reasuransi yaitu Ignasia, atas pengajuan klaim terjamin macet (sesuai PKS antara Jamkrida dan Ignasia mengatur klausula bahwa jika terjamin wanprestasi disebabkan karena kredit macet maka Ignasia akan membayarkan kewajiban terjamin senilai 40% dari jumlah klaim yang telah dibayarkan Jamkrida kepada mitra penerima jaminan).